

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PEMETAAN FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PARTISIPASI PEMILIH DI  
KABUPATEN BANTUL**



**TIM PENELITI**

**DR. SURANTO (Ketua)**

**TUNJUNG SULAKSONO, M.Si. (Anggota)**

**AWANG DARU MURTI, M.Si. (Anggota)**

---

**RISET KOLABORATIF  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL DENGAN  
PRODI ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2015**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**RISET KOLABORATIF PRODI ILMU PEMERINTAHAN UMY DENGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

**Judul Penelitian** : **Pemetaan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Di Kabupaten Bantul**

**Ketua Peneliti:**

a. Nama Lengkap : Dr. Suranto  
b. NIDN/NIK : 05112056501  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

**Anggota Peneliti (1)**

a. Nama Lengkap : Tunjung Sulaksono, M.Si.  
b. NIDN /NIK : 0508117102  
c. Jabatan Fungsional : Lektor  
d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

**Anggota Peneliti (2)**

a. Nama Lengkap : Awang Darumurti, MSi  
b. NIDN /NIK : 0519108101  
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

**Biaya Penelitian :**

KPU Kab Bantul: Rp. 10.000.000,-  
Prodi IP UMY : Rp. 10.000.000,-

Mengetahui,  
Ketua KPU Kab Bantul



**M. Johan Komara, S.IP**

Yogyakarta, 01 Agustus 2015

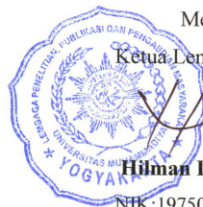
Ketua Peneliti,

**Dr. Suranto**

NIK: 19650512199105163014

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian UMY



**Hilman Latief, M.A. PhD**

NIK: 19750912200004113033

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah swt kami panjatkan atas selesainya penulisan laporan akhir hasil riset kerjasama KPU Bantul dengan Prodi Ilmu Pemerintahan UMY yang berjudul “Pemetaan Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Di Kabupaten Bantul” ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 serta mengeksplorasi faktor-faktor determinannya, mengingat tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul termasuk tinggi.

Besar harapan kami, hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi serta memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik pada masa mendatang. Tentunya tak ada gaidng yang tak retak, kritik dan saran guna perbaikan hasil riset ini sangat dinantikan.

Tak lupa kami sampaikan terimakasih kepada : Pertama, Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Bantul yang telah memberikan kepercayaan riset serta menyediakan dana riset. Kedua, Tim Surveyor IP UMY yang rajin dan pantang menyerah untuk mengumpulkan data. Serta Ketiga, sumber data serta peserta FGD yang telah memperkaya hasil riset kolaboratif ini.

Bantul, 1 Agustus 2015

**Dr. Suranto**

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I     PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	24
BAB II    DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	29
A. Kabupaten Bantul	29
B. Kecamatan Banguntapan	33
C. Kecamatan Sanden	38
D. Kecamatan Imogiri	42
E. Kecamatan Pajangan	46
BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Kecamatan Banguntapan	51
B. Kecamatan Sanden	58
C. Kecamatan Imogiri	62
D. Kecamatan Pajangan	70
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Di Kabupaten Bantul	74
BAB IV    PENUTUP	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA	78

## **Abstract**

Election is an important element of democracy. As a consequence of a democracy, post-New Order Indonesia held four legislative elections regularly that were held in 1999, 2004, 2009, and 2014 and presidential elections in 2004, 2009, and 2014. In order to strengthen the legitimacy of local government head, Indonesia also held direct local executive election since 2005 onward. World have nevertheless admitted that the first Post-New Order 1999 was a peaceful, fair and free election, met the global democracy standard with an impressive voter's participation, reaching 92,7% of voter's turnout. The subsequent elections also performed alike, strengthen assumption that Indonesia has remarkably succeeded in making a democratic leap. (Soebagio, 2008).Unfortunately, election in Indonesia still faces challenges to tackle, which one of those is the decline in voter participation. But in the middle of national trend, Bantul booked an anomaly. Participation level in Bantul also always higher compared to the national average. Nevertheless Bantul still face a problem of participation discrepancy. For instance, Triwidadi village booked 87.7% voter's turn out in 2014 legislative election, but in Banguntapan village only booked 74.3% of participation within the election. Considering the fact, it is important to figure out factors influencing electoral participation among the Bantulese. By identifying the factors we might draw a certain pattern that could be a recommendation to the Bantul electoral commission to develop a right policy. The factors determine high level of voter's participation in Bantul Regency are as follows: (1) political affiliation of closest relations; (2) participation stimulus; (3) tight social control; (4) voter's mobilization; (5) The concern of societal institution. Meanwhile the factors hamper voter's participation are as follows: (1) The saturation of voters toward elections; (2) Less-frequent and less-innovative socialization; (3) less-accurate voter data gathering; (4) the lack of social bond and control; (5) pragmatism.

**Keywords:** voter participation, Bantul Regency, determinant factors, election

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilu merupakan elemen penting dari demokrasi. Bahkan dalam banyak teori demokrasi, pemilu menjadi salah satu indikator untuk mengukur kualitas demokrasi (Dahl, 1971:3; Schumpeter, 1976:260; Nielsen, 1991:5). Sebagai konsekuensi dari sebuah negara demokrasi, Indonesia pasca Orde Baru telah menyelenggarakan empat kali pemilihan umum legislatif secara reguler, yaitu 1999, 2004, 2009, dan 2014. Untuk menegaskan azas presidensialisme, Indonesia kemudian juga melangsungkan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004, 2009, dan 2014. Selain itu, untuk memperkuat legitimasi kepala daerah serta menyelaraskan dengan asas presidensialisme pada pemerintahan nasional, Indonesia sejak 2005 juga telah menyelenggarakan pemilu kepala daerah secara langsung.

Meskipun masih terdapat berbagai kekurangan, namun dunia internasional mengakui dan memuji, bahwa pemilu tahun 1999 sebagai Pemilu pertama di era reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib, jujur, dan adil, serta dipandang memenuhi standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi, yang mencapai 92,7%. Demikian juga pemilu-pemilu selanjutnya menuai pujian serupa, bahwa pemilu di Indonesia berlangsung secara relatif damai, jujur dan adil, yang menunjukkan kualitas atau taraf demokrasi di Indonesia. Fakta ini memperkuat asumsi bahwa Indonesia dinilai telah melakukan suatu lompatan demokrasi (Soebagio, 2008).

Namun jika dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, pemilu di Indonesia masih menyisakan banyak pekerjaan rumah karena

terindikasinya kecenderungan menurunnya partisipasi pemilih atau *voter's turn out* dalam berbagai pemilu yang digelar. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi oleh rakyat atau yang biasa disebut sebagai prinsip kedaulatan rakyat, yang dimanifestasikan melalui keterlibatan mereka dalam pemilu. Makin tinggi tingkat partisipasi politik biasanya mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Demikian pula sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan

Partisipasi pemilih di Indonesia sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif. Pada pemilu legislatif, penurunan partisipasi pemilih sekitar 10% konsisten terjadi sampai pada pemilu 2009. Sementara itu pada pemilu 2014, angka partisipasinya naik sebesar 5%. Pada kasus pilpres, tercatat dalam pemilu 2014 pertama kalinya dalam sejarah angka partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif. Fluktuasi tersebut juga bisa dilihat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tengah kecenderungan menurunnya partisipasi pemilih secara nasional pada Pemilu Legislatif 2009, tingkat partisipasi pemilih Pilpres 2009 di DIY justru mengalami kenaikan. Partisipasi pemilih pilpres di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan dibanding pemilu legislatif 2009. Berdasarkan data rekapitulasi KPU DIY, partisipasi pemilih pada pemilu legislatif tercatat 72,94 persen, namun pada pemilu presiden 2009 naik 3 persen menjadi 75,97 persen. Dari semua kabupaten/kota tercatat bahwa tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Bantul tercatat paling tinggi, yaitu 79,1 persen, naik lebih dari 5 persen dari pileg, yaitu 74,08 persen. Kemudian disusul Sleman dengan persentase partisipasi 77,6 persen naik dari 72,7

persen, Gunungkidul 75,4 persen lebih tinggi dari pileg 75,1 persen. Kabupaten Kulonprogo 73,5 persen, naik tipis dari pileg 73,4 persen. Paling rendah yaitu Kota Yogyakarta 69,2 persen. Kenaikan partisipasi tersebut berbalik dari tren Pilpres 2004. Pada 2004, tren-nya menurun mulai dari pileg, pilpres putaran pertama, dan pilpres putaran kedua kembali menurun.

Adapun partisipasi pemilih di DIY dalam pemilu legislatif 2014, mencapai 80,04 persen atau melebihi target nasional 75 persen. Angka partisipasi terendah terjadi di Kota Yogyakarta yaitu 75,88 persen. Sedangkan partisipasi pemilih tertinggi di Sleman yang mencapai angka 81,44 persen. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut, tingkat partisipasi di Bantul menduduki peringkat kedua yaitu 81,24 persen, Kulonprogo 80,66 persen, dan Gunungkidul 78,54 persen. Sedangkan pada pemilu presiden 2014 tingkat partisipasi pemilih di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 79,85 persen, atau mengalami penurunan 0,2 persen dibandingkan saat Pemilu Legislatif. Meski demikian, angka tersebut masih di atas target nasional 75 persen.

Meskipun angka partisipasi pemilih dalam pemilu presiden (pilpres) di DIY menurun dibanding saat pemilihan legislatif, namun secara nasional partisipasi pemilih DIY paling unggul. Angka partisipasi Pilpres tahun 2014 juga masih lebih tinggi sekitar 4 persen jika dibandingkan saat Pilpres 2009. Bahkan khusus untuk Bantul, angka partisipasi dalam pilpres 2014 naik sedikit menjadi 81,3 persen jika dibandingkan dengan pemilu legislatif di tahun yang sama. Meskipun naik dibandingkan pemilu presiden tahun sebelumnya, namun peringkat pertama tahun 2014 diduduki Sleman yang mencapai 81,7% atau naik hampir empat persen dibanding pilpres 2009.



Meskipun tingkat partisipasi di kabupaten Bantul cenderung mengalami kenaikan, sama seperti kecenderungan di kabupaten/kota lain di wilayah DIY, akan tetapi jika dicermati masih terdapat kesenjangan antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain yang cukup besar. Sebagai contoh misalnya, di Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan pada Pileg 2014 lalu tingkat partisipasinya mencapai 87,7 persen, sementara di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan hanya mencapai 74.3%. Kesenjangan tersebut juga terlihat jika dicermati data per desa dalam satu kecamatan.

Melihat realitas tersebut, maka penting kiranya untuk melakukan penelitian untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Bantul, sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat diidentifikasi suatu pola tertentu dari faktor-faktor tersebut yang kemudian diharapkan dapat memberikan input bagi pengembangan strategi dan kebijakan penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul, terutama Komisi Pemilihan Umum, dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Apalagi diakui oleh KPU Republik Indonesia bahwa riset pemilu merupakan salah satu elemen strategis dalam manajemen pemilu. Riset tidak hanya memberikan rasionalitas akademik mengenai suatu substansi pemilu. Riset lebih jauh memberikan pijakan empirik mengenai persoalan atas hal yang menjadi perdebatan. Hasil riset memastikan program dan kebijakan kepiluan tidak dibangun atas postulat spekulatif, akan tetapi dikonstruksi berlandaskan pada argumen empirik dan rasional dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu di Kabupaten Bantul?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui peta tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Bantul dalam pemilu.

### **D. Kerangka Konseptual**

#### **1. Pemilu dan Demokrasi**

##### **a. Kedudukan Pemilu dalam Demokrasi**

Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada Negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karenanya pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan, maka Negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan pemilunya dengan baik yang ditandai dengan terjadinya berbagai kecurangan, diskriminasi, dan manipulasi maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi (Hendrik, 2010).

Pemilu dalam sebuah negara demokrasi merupakan suatu sarana bagi terselenggaranya proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat yang mengandung arti bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif

dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan, kebijakan publik, maupun pemimpin atau pejabat politik. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Dengan pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif. Menurut Robert Dahl, pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilihan umum dewasa ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala.

Di Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih Presiden, Gubernur dan Bupati/ Walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi

dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya (Hendrik, 2010).

### **b. Fungsi Pemilu**

Pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. *Pertama*, pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.

*Kedua*, pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.

*Ketiga*, pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin atau rotasi kekuasaan secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.

*Keempat*, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat. Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa atau pemimpin politik dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah, berdasarkan hukum yang disepakati bersama, tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Menurut Ginsberg, fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yaitu untuk mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadic dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional.

*Kelima*, pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

Terkait dengan pentingnya pemilu dalam proses demokratisasi di suatu Negara, maka penting untuk mewujudkan pemilu yang memang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi dan mendukung demokrasi itu sendiri. Pemilihan akan system pemilu adalah salah satu yang sangat penting dalam setiap Negara demokrasi, kebanyakan dari system pemilu yang ada sebenarnya bukan tercipta karena dipilih, melainkan karena kondisi yang ada didalam masyarakat serta sejarah yang mempengaruhinya.

Pada tingkat aktor politik, kepentingan elite politik dan kepentingan partai yang bersifat jangka pendek masih mendominasi arah transisi demokrasi di Indonesia. Semua ini tentu saja berdampak pada tertundanya kembali konsolidasi demokrasi. Seperti dikemukakan oleh Larry Diamond (1999), konsolidasi demokrasi tidak cukup hanya dengan terselenggaranya pemilu secara prosedural, melainkan juga melembaganya komitmen demokrasi pada partai-partai dan parlemen yang dihasilkannya. Dengan begitu transisi demokrasi masih akan berlangsung dalam tarik-menarik kepentingan pribadi, partai dan kelompok, sehingga cenderung mengarah pada pelestarian status quo politik ketimbang menuju suatu demokrasi yang lebih baik serta pemerintahan yang bersih dan lebih bertanggung jawab.

## **2. Partisipasi Politik**

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik dapat juga difahami sebagai proses keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Huntington dan Nelson

(1994:4) dalam bukunya *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* memaknai partisipasi politik sebagai:

*“By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective.*

Dari definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Selanjutnya dari definisi Huntington dan Nelson tersebut kita juga dapat menyimpulkan bahwa partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, berkelanjutan atau sporadik, berlangsung secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Dalam definisi di atas, Huntington dan Nelson melihat bahwa partisipasi politik lebih difokuskan pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh Pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan *lobbyist professional* yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya.

Dalam perspektif lain McClosky (1972:20) dalam *International Encyclopedia of the social sciences* menyatakan bahwa:

*“The term “political participation” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy.*

Mc Closky dalam definisi di atas memahami partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan yang berifat sukarela dari warga masyarakat yang ditunjukkan melalui proses pemilihan penguasa dan melalui, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Ilmuwan lain, Nie dan Verba (1975) dalam *Handbook of Political Science* mengemukakan bahwa:

*“By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personel and/or the actions they take*

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warganegara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Dalam perspektif pengertian yang generik, Budiardjo (1996:183) memaknai partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan Pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.



Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sementara Michael Rush dan Philip Althof menjelaskan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan publik.

Berbagai definisi partisipasi politik dari para pakar ilmu politik tersebut diatas, secara eksplisit mereka memaknai partisipasi politik bersubstansi *core political activity* yang bersifat personal dari setiap warganegara secara sukarela untuk berperanserta dalam proses pemilihan umum untuk memilih para pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penetapan kebijakan publik.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, merupakan hal yang sangat penting pula untuk dielaborasi, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatanrakyat.

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga Negara berperan serta dalam proses

politik. Menurut pendapat beberapa ahli beberapa faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik antara lain:

### *1. Status sosial dan ekonomi*

Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik (Surbakti, 1992).

### *2. Situasi*

Menurut Ramlan Surbakti, situasipolitik juga dipengaruhi oleh keadaanyang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga,kehadiran orang lain, keadaan ruang,suasana kelompok, dan ancaman (Surbakti, 1992).

### *3. Afiliasi politik orang tua*

Afiliasi berarti bergabung dalam suatukelompok atau kumpulan. Afiliasipolitik dapat dirumuskan sebagaikeanggotaan atau kerjasama yangdilakukan individu atau kelompokyang terlibat ke dalam aliran-aliranpolitik tertentu. Afiliasi politikmendorong tumbuhnya kesadaran dankedewasaan politik masyarakat untukmenggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalammelakukan berbagai aktifitas politik,seperti ikut dalam partai politik dalampemerintahan, ikut dalam prosespengambilan dan pelaksanaankeputusan politik (Surbakti, 1992).

### *4. Pengalaman berorganisasi*

Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpolakan dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama (Simangunsong, 2004).

#### *5. Kesadaran politik*

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup (Hendrik, 2010).

#### *6. Kepercayaan terhadap pemerintah*

Kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan (Hendrik, 2010).

#### *7. Stimulan partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi Informal (Hendrik, 2010)*

Peran media dalam mensosialisasikan pemilu juga dianggap merupakan faktor penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam suatu pemilu. Dengan terinformasikannya pemilu secara luas terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan serta cara pemilihan serta informasi yang lain terkait dengan pemilu, maka akan berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang pemilu yang akan berdampak terhadap partisipasi itu sendiri. Tidak kalah penting dari sosialisasi media, diskusi-diskusi tentang pemilu yang dilakukan secara ringan dan informal pun dianggap punya andil dalam mengakumulasi pengetahuan masyarakat

tentang pemilu, yang semua itu pada gilirannya akan diharapkan berdampak positif terhadap tingkat partisipasi dalam pemilu.

### **3. Voting Behaviour (Perilaku Pemilih)**

#### **a. Jenis perilaku pemilih**

Perilaku adalah manifestasi dari sikap seseorang. Oleh karena itu sangat masuk akal apabila sikap ditafsirkan dari bentuk perilaku seseorang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu, kita dapat memperhatikan perilakunya, sebab perilaku merupakan salah satu indikator sikap individu. (Bawono, Muhammad:2008). Perilaku seseorang dalam pemilihan umum atau biasa disebut perilaku pemilih merupakan suatu elemen penting dalam pembuatan keputusan politik seseorang sebagai warga negara terhadap kepemimpinan bangsa dan negara. Perilaku pemilih menurut Surbakti adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilu maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang terdiri dari beragam kelompok yang memiliki keanekaragaman pemikiran dalam mengambil sebuah keputusan untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak. Sehingga hal ini membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk mengetahui perilaku pemilih.

Paling tidak hingga saat ini terdapat tiga pendekatan teori yang seringkali digunakan oleh para ilmuwan untuk memahami perilaku pemilih yakni, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan pilihan rasional (*rational choice theory*). Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrumen

kemasyarakatan seseorang seperti, (i) status sosiekonomi (seperti pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan dan klas), (ii) agama, (iii) etnik bahkan (iii) wilayah tempat tinggal (misalnya kota, desa, pesisir ataupun pedalaman). Beberapa hal ini menurut sarjana yang mengusungnya, Lipset (1960), Lazarsfeld (1968)—sekadar menyebut beberapa nama saja, memunyai kaitan kuat dengan pilihan atau perilaku pemilih.

Awalnya, penelitian mengenai perilaku ini dicetuskan oleh sarjana-sarjana ilmu politik dari University of Columbia yang kemudiannya pendekatan ini sering juga disebut dengan Columbia's school. Kajian yang dilakukan oleh sarjana ilmu politik di University of Columbia ini dibuat pada waktu pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada tahun 1940, dan mereka mendapati sebuah pola yang memunyai kaitan yang erat dengan aspek-aspek yang dinyatakan di atas. Misalnya, dari segi klas, klas bawah dan kelas menengah berkecenderungan untuk mendukung Partai Demokrat, sementara klas atas menyokong Partai Republik (Lipset 1960:305). Demikian pula halnya jika dilihat dari aspek agama, penganut agama Kristen Protestan di AS cenderung memilih Partai Republik dibandingkan dengan mereka yang memeluk agama Katolik (Lazarsfeld 1968:21-22).

Pendekatan kedua disebut dengan pendekatan psikologis, yang dikembangkan oleh beberapa sarjana—Campbell *et al.* (1960), Jaros & Grant (1974), Rose & McAllister (1990) dan lainnya—dari Michigan University di bawah The Michigan Survey Research Centre. Pendekatan ini tidak jarang disebut sebagai Michigan's school yang menerangkan bahwa perilaku pemilih sangat tergantung pada sosialisasi politik lingkungan yang menyelimuti diri pemilih. Identifikasi kepartaian adalah wujud dari sosialisasi politik yang bisa dibina oleh orangtua, organisasi sosial kemasyarakatan dan lainnya. Sosialisasi ini berkenaan dengan nilai dan norma yang diturunkan oleh orang tua, organisasi sosial kemasyarakatan dan

lainnya sebagai bentuk penurunan dan penanaman kepada generasi baru. Oleh sebab itu, pilihan seorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik (identifikasi kepartaian), maka tidak jarang ia akan memilih partai yang sama dengan yang dipilih oleh orangtuanya. Selain itu, terdapat kecenderungan (dalam Michigan's school ini) bahwa seseorang yang telah mendapatkan sosialisasi politik lama kelamaan akan memiliki keyakinan yang kuat terhadap partai yang dipilihnya (Campbell *et al.* 1960:163). Untuk kasus terhadap anak-anak, menurut Jaros dan Grant (1974:132), identifikasi kepartaian lebih banyak disebabkan oleh pengimitasian sikap dan perilaku anak ke atas sikap dan perilaku orangtuanya. Hal ini juga terjadi di Inggris, khususnya pada anak-anak pekerja atau kelas buruh yang melakukan pencontohan terhadap pilihan para orangtua mereka (Rose & McAllister 1990). Untuk kasus Indonesia, dalam pemilihan umum Orde Baru tertentu, kesetiaan para anak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tentara (ABRI) kepada Golongan Karya (Golkar) tampak sangat jelas dibandingkan dengan anak-anak dari kelompok lainnya (Leo Agustino 2003).

Pendekatan ketiga, pendekatan pilihan rasional (rational choice theory) yang dipopularkan oleh Downs (1957) yang mengasumsikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam bilik suara, tanpa mengira agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orangtua dan macam sebagainya. Dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai atau calon presiden yang bertanding, maka ia tidak akan melakukan pilihan pada Pemilu (Downs 1957:261). Kajian Downs diperkuat oleh argumen Pappi dalam tulisannya *Political behavior: reasoning voters and multi-party systems* (1996) yang menyatakan bahwa pilihan rasional dilandaskan pada kalkulasi ekonomi, di mana perhitungan biaya yang dikeluarkan lebih besar dengan apa yang akan didapatnya kelak, maka jalan terbaik bagi pemilih adalah melakukan

kegiatan atau aktivitas kesehariannya. Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon atau partai yang bertanding akan berupaya dan berusaha untuk mengemukakan pelbagai program untuk menarik simpati dan keinginan pemilih memilih. Namun, apabila partai ataupun calon presiden itu gagal mempromosikan programnya pada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih adalah rasional bagi pemilih.

### **b. Tipologi Pemilih**

Dalam memilih sebuah partai politik maupun kontestan, pemilih memiliki perilaku dalam mengambil keputusan untuk menentukan pilihannya. Menurut Firmanzah (2012:113), pada kenyataannya pemilih adalah dimensi yang sangat kompleks. Terkadang perilaku pemilih ini rasional dan non-rasional dalam menentukan keputusannya. Menurut Zamroni (2007:18) Tipologi yaitu karakter yang unik dan spesifik yang melekat pada orang-orang tertentu yang membedakannya dengan orang lain. Perilaku pemilih yang terkadang rasional dan non rasional menjadikan pemilih memiliki karakter yang berbeda pada setiap pemilih. Selain itu pandangan pemilih dalam menentukan pilihan terhadap partai politik dan kontestan menjadikan karakter yang membedakan pada setiap pemilih. Sehingga pemilih memiliki peran yang berbeda-beda pula pada pemilihan umum.

Firmanzah (2012:113-114) menyatakan, bahwa dalam diri masing-masing pemilih terdapat dua orientasi sekaligus yaitu; (1) orientasi '*policy-problem-solving*', dan (2) orientasi '*ideologi*'. Ketika pemilih menilai partai politik atau seorang kontestan dari kacamata '*policy-problem solving*', yang terpenting bagi mereka adalah sejauh mana para kontestan mampu menawarkan program kerja atas solusi bagi suatu permasalahan yang ada. Pemilih akan cenderung secara objektif memilih partai politik atau kontestan yang memiliki kepekaan terhadap masalah nasional dan kejelasan program kerja. Partai politik atau kontestan yang

arah kebijakannya tidak jelas akan cenderung tidak dipilih. Sementara pemilih yang lebih mementingkan ikatan ‘*ideology*’ suatu partai atau kontestan, akan lebih menekankan aspek-aspek subjektifitas seperti kedekatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi dan psikografis. Semakin dekat kesamaan partai politik atau calon kontestan, pemilih jenis ini akan cenderung memberikan suaranya kepartai dan kontestan tersebut.

Firmanzah (2012: 120-126) memetakan tipologi ke dalam empat kolom tipologi pemilih, yaitu :

### **1. Pemilih Rasional**

Pemilih memiliki orientasi pada ‘*policy problem solving*’ dan berorientasi rendah untuk faktor idologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik dan kontestan dalam program kerjanya. Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ideology kepada suatu partai atau seorang kontestan. Faktor seperti paham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang signifikan. hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan, daripada paham dan nilai partai atau kontestan.

### **2. Pemilih Kritis**

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai politik atau seorang kontestan cukup tinggi



dan tidak semudah *'rational voter'* untuk berpaling ke partai lain. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara system nilai partai (*ideology*) dengan kebijakan yang akan dibuat. Pemilih jenis ini harus di *'menage'* sebaik mungkin oleh sebuah partai politik atau seorang kontestan, pemilih memiliki keinginan dan kemampuan untuk terus memperbaiki kinerja partai, sementara kemungkinan kekecewaan yang bisa berakhir ke frustrasi dan pembuatan partai politik tandingan juga besar.

### **3. Pemilih tradisional**

Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi *ideology* yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan social-budaya, nilai asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut. Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye, loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling kelihatan bagi pemilih jenis ini.

### **4. Pemilih Skeptis**

Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga sebagai sesuatu penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan

ideologis mereka memang rendah sekali. Mereka juga kurang mempedulikan program kerja atau ‘*platform*’ dan kebijakan sebuah partai politik.

#### **4. Tahapan Pemilu**

Pemilu legislatif di Indonesia diselenggarakan menurut sekuensi sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

Kegiatan awal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pemilu adalah pendaftaran orang-orang yang memiliki hak untuk memilih, misalnya yang sudah berusia minimal 17 tahun, bukan anggota TNI/Polri, tidak terganggu jiwanya dan sebagainya. Pendaftaran pemilih sangat penting untuk memastikan hanya mereka yang berhak yang bisa menggunakan hak pilihnya, juga untuk pengadaan logistik pemilu seperti pencetakan surat suara, pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS), bilik dan kotak suara dan sebagainya.

2. Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu;

Tidak semua orang atau partai boleh ikut pemilu, tanpa ada syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa didaftarkan sebagai peserta pemilu. Tugas KPU adalah memverifikasi (memeriksa) kelengkapan syarat-syarat itu sehingga mereka bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu.

3. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

Pemilu dimaksudkan untuk memperebutkan kursi di DPR, DPD atau DPRD. Berapa jumlah kursi perlu diatur berdasarkan wilayah tertentu yang disebut dengan daerah pemilihan.

4. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

Tahap selanjutnya adalah pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Partai politik akan mengajukan daftar calon untuk dipilih rakyat dalam pemilu secara langsung.

5. Masa kampanye;

Tujuan kampanye sebenarnya untuk memperkenalkan visi, misi dan program partai atau calon kepada rakyat kalau mereka terpilih sebagai wakil rakyat.

6. Masa tenang;

Masa tenang adalah masa antara berakhirnya kampanye dan pemungutan suara. Saat itu semua bentuk kampanye harus dihentikan dan semua pihak fokus pada persiapan pemungutan suara.

7. Pemungutan dan penghitungan suara;

Inilah tahapan yang dinanti-nanti semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Saat itu rakyat diberi kesempatan untuk mendatangi TPS guna memilih calon pemimpin atau wakil rakyat yang mereka nilai layak mewakili mereka. Setelah pemungutan suara usai, akan dilakukan penghitungan suara.

8. Penetapan hasil Pemilu;

Setelah suara dihitung, barulah hasilnya ditetapkan. Saat itu akan diketahui siapa yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu, siapa saja yang terpilih jadi wakil rakyat, berapa banyak jumlah suara yang diperoleh setiap peserta pemilu.

9. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Setelah KPU menetapkan hasil pemilu dan calon terpilih, para calon wakil rakyat itu akan dilantik sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Kualitatif**

Metodologi secara umum didefinisikan sebagai *"a body of methods and rules followed in science or discipline"*. Sedangkan metode sendiri adalah *"a regular systematic plan for or way of doing something"*. Kata metode berasal dari istilah Yunani *methodos* (*meta+bodos*) yang artinya cara.<sup>1</sup> Jadi, metode penelitian sosial adalah cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan fenomena sosial yang tengah ditelisiknya. Secara dikotomis, dalam ilmu sosial dikenal dua jenis metode penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif.

Dalam penelitian sosial, masalah penelitian, tema, topik, dan judul penelitian berbeda secara kualitatif maupun kuantitatif. Baik substansial maupun materil kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan metodologis. Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi dipermukaan. Akan tetapi masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Untuk mengetahui peta partisipasi dan tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul, peneliti memerlukan analisis mendalam terkait fenomena tersebut. Peneliti perlu mengidentifikasi sejauh mana partisipasi politik masyarakat dalam berbagai tahapan pemilu dan rasionalitas dari sikap tersebut. Dengan melihat pada kebutuhan riset di atas, maka penelitian ini akan mempergunakan desain penelitian kuantitatif.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal. Dalam mencari informasi, peneliti melakukan dua jenis wawancara, yaitu autoanamnesa (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden) dan aloanamnesa (wawancara dengan keluarga responden). Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building rapport, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif.

#### **b. Dokumen**

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

#### **c. Focused Group Discussion (FGD)**

FGD dilaksanakan sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam riset ini, terutama dalam tahap akhir riset sebagai *tools* atau mekanisme untuk

mengkonfirmasi hasil temuan di lapangan. FGD akan menghadirkan para pelaku pemilu, perwakilan pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang dipandang relevan dalam memberikan informasi bagi penelitian ini.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bantul, dengan rasionalisasi sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang masalah. Bantul yang terdiri atas 17 kecamatan dan 75 desa diklasifikasikan ke dalam 3 karakteristik wilayah, yaitu wilayah sub-urban, wilayah pegunungan dan wilayah pesisir. Wilayah urban diwakili oleh Kecamatan Banguntapan, wilayah pegunungan diwakili oleh Kecamatan Imogiri dan wilayah pesisir diwakili oleh Kecamatan Sanden. Setiap kecamatan akan diambil dua desa sebagai *representative sample*, yaitu desa dengan partisipasi tertinggi dan desa dengan partisipasi terendah. Ketiga karakteristik tersebut akan dikontrol oleh kecamatan Pajangan yang secara geografis merupakan wilayah pegunungan yang medannya cukup sulit, akan tetapi justru tingkat partisipasinya termasuk tertinggi di Kabupaten Bantul.

### **4. Analisis Data**

Langkah-langkah analisis data pada studi kasus, yaitu:

- a. Mengorganisir informasi.
- b. Membaca keseluruhan informasi dan memberi kode.
- c. Membuat suatu uraian terperinci mengenai kasus dan konteksnya.
- d. Peneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori.

- e. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi dan mengembangkan generalisasi natural dari kasus baik untuk peneliti maupun untuk penerapannya pada kasusyang lain.
- f. Menyajikan secara naratif.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Kabupaten Bantul**

##### **1. Kondisi Geografis**

Wilayah Kabupaten Bantul terletak antara 1100 12'34'' sampai 1100 31' 08'' Bujur Timur dan antara 70 44' 04'' sampai 80 00'27'' Lintang Selatan. Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten dari 5 Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terletak di Pulau Jawa. Bagian utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, yaitu Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan,



Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan dan Sedayu. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 Ha yang terbagi dalam 17 Kecamatan, yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah dan Banyaknya Desa menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul, 2014**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Prosentase	Jumlah Desa
1	Srandakan	1.832	3,61	2
2	Sanden	2.316	4,57	4
3	Kretek	2.677	5,28	5
4	Pundong	2.368	4,67	3
5	Bambanglipuro	2.270	4,48	3
6	Pandak	2.430	4,79	4
7	Bantul	2.195	4,33	5
8	Jetis	2.447	4,83	4
9	Imogiri	5.449	10,75	8
10	Dlingo	5.587	11,02	6
11	Pleret	2.297	4,53	5
12	Piyungan	3.254	6,42	3
13	Banguntapan	2.848	5,62	8
14	Sewon	2.716	5,36	4
15	Kasihan	3.238	6,39	4
16	Pajangan	3.325	6,56	3
17	Sedayu	3.436	6,78	4
<b>Total</b>		<b>50.685</b>	<b>100,00</b>	<b>75</b>

*Sumber: Bantul dalam Angka, BPS 2014.*

## 2. Penduduk dan Ketenagakerjaan

### a. Penduduk

Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk Tahun 2010-2020, jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2013 adalah 955.015 jiwa yang tersebar di 75 Desa dan 17 Kecamatan. Dari jumlah tersebut, 475.872 jiwa adalah laki-laki dan 479.173 jiwa adalah perempuan. Jika dibandingkan dengan data hasil sensus penduduk SP 2010 tahun 2010 yang tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bantul 911.503 jiwa berarti dalam 3 tahun terakhir telah terjadi penambahan jumlah penduduk 43.512 jiwa. Dengan luas wilayah 506,85 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kabupaten Bantul tahun 2013 adalah 1.884 jiwa per km<sup>2</sup> dan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Banguntapan yakni 4.620 jiwa per km<sup>2</sup> sedangkan Kecamatan Dlingo memiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 647 jiwa per km<sup>2</sup> .

#### **b. Ketenagakerjaan**

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, tercatat jumlah pendaftar pencari kerja pada tahun 2013 sebesar 9.239 orang. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2013 tercatat sebanyak 2.019 jiwa, yang terdiri dari 489 orang laki-laki dan 1.530 orang perempuan. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang social, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2012 di Kabupaten Bantul, persentase penduduk angkatan kerja sebesar 70,76 persen, naik 1,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara persentase jumlah penduduk yang bekerja sebesar 96,40 terhadap jumlah angkatan kerja , bertambah sebesar 0,20 persen jika dibandingkan dengan tahun 2010. Persentase pengangguran di Kabupaten Bantul pada tahun 2012 mencapai 3,60 berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### c. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan upaya untuk mengurangi kepadatan penduduk di suatu wilayah untuk dipindahkan ke wilayah lain yang kurang padat penduduk. Jumlah transmigran umum asal Kabupaten Bantul pada tahun 2013 ada sebanyak 170 Jiwa, yang berasal dari 53 Kepala Keluarga (KK). Sejumlah 87 jiwa di Sumatra Selatan, 49 jiwa di Kalimantan Tengah, 18 jiwa di Sulawesi Tengah dan 16 jiwa di Sulawesi Selatan.

**Tabel 2.2**

**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul, 2013**

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Srandakan	14.340	14.595	28.935
2	Sanden	14.690	15.249	29.939
3	Kretek	14.375	15.454	29.829
4	Pundong	15.678	16.419	32.097
5	Bambanglipuro	18.705	19.216	37.921
6	Pandak	24.229	24.329	48.558
7	Bantul	30.455	30.889	61.344
8	Jetis	26.500	27.092	53.592
9	Imogiri	28.472	29.062	57.534
10	Dlingo	17.825	18.340	36.165
11	Pleret	22.697	22.619	45.316
12	Piyungan	25.937	26.219	52.156
13	Banguntapan	66.636	64.948	131.584
14	Sewon	55.784	54.571	110.355

15	Kasih	59.712	59.559	119.271
16	Pajangan	17.096	17.371	34.467
17	Sedayu	22.741	23.211	45.952
<b>Total</b>		<b>475.872</b>	<b>479.143</b>	<b>955.015</b>

*Sumber: Bantul dalam Angka, BPS 2014.*

#### **d. Pendidikan**

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, jumlah Taman Kanak-kanak di Kabupaten Bantul pada Tahun Ajaran 2012/2013 sebanyak 524 buah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 355 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 88 buah, Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 19 buah, SMU Swasta 16 buah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 12 buah dan SMK Swasta 32 buah.

#### **e. Agama**

Berdasarkan data dari Departemen Agama, jumlah penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2013 pemeluk agama ada sebanyak 917.431 jiwa, yang didominasi oleh pemeluk agama Islam (95,67%). Selebihnya tersebar di 4 agama yang lain, yaitu agama Katholik 2,89%, Kristen 1,33%, Hindu 0,08%, Budha 0,02% dan Lainnya 0.01%. Jamaah haji dari Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sebanyak 642 orang atau menurun dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat sebesar 802 orang (menurun sebesar 19,95 persen).

### **B. Kecamatan Banguntapan**

#### **1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Banguntapan yang secara astronomi keberadaan kantor Kecamatannya terletak di 1100 24' 12" Bujur Timur dan 70 49' 29" Lintang Selatan merupakan salah satu

bagian dari wilayah Kabupaten Bantul. Berdasarkan posisi geografis, Kecamatan Banguntapan terletak di sebelah Timur Laut dari Ibukota Kabupaten Bantul. Dengan posisi bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Piyungan, bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Sewon, bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Depok, Sleman sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Pleret. Jika dilihat topografisnya, Kecamatan Banguntapan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran. Sungai Code dan Opak, merupakan sungai utama yang menyusuri wilayah Kecamatan Banguntapan. Sedangkan jalur utama lalu lintas antar daerah di wilayah kecamatan, dilalui oleh jalan Provinsi yang merupakan akses utama sebagai penghubung antar wilayah.

Penggunaan lahan di Kecamatan Banguntapan sebagian besar digunakan untuk lahan bukan pertanian (bangunan, pekarangan) sebesar 1.626 Ha atau 57,09 persen. Sedangkan penggunaan lahan untuk lahan sawah 1.160 Ha (40,73) dan lahan bukan sawah hanya seluas 62 Ha (2,18 %).

## **2. Pemerintahan**

Kecamatan dengan luas wilayah mencapai 5,62 persennya dari wilayah yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu luas wilayah sebesar 2.848 ha. Kecamatan Banguntapan terdiri dari 8 (delapan) desa yaitu Desa Tamanan 375 ha (13.17 %), Jagalan 27 ha ( 0,95 %), Singosaren 67 ha (2,35 %), Wirokerten 386 ha (13,55 %), Jambidan 376 ha (13,20%), Potorono 390 ha ( 13,69%), Baturetno 394 ha (13,83 %) dan Banguntapan 833 ha (29,25 %). Ibukota kecamatan berada di Desa Baturetno. Dari ke-8 desa tersebut, Desa Banguntapan merupakan desa terluas dan desa dengan jumlah pedukuhan dan Rukun Tetangga (RT) terbanyak yaitu 11 Pedukuhan dan 201 RT. (rukun Tetangga) Kecamatan Banguntapan, seperti kecamatan lainnya, dikepalai

oleh seorang camat. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Banguntapan ada 24 orang, terdiri dari 11 orang laki-laki (40 persen) dan 13 orang perempuan (60 persen). Sedangkan jika dirinci menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah 1 orang yang tamat SD, 9 orang tamat SLA/D1/D2, 1 orang tamat D3, 12 orang tamat Sarjana S1/D4 dan 1 orang tamat Sarjana S2/Sarjana S3.

### **3. Kependudukan**

Penduduk mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan, karena penduduk juga dapat diposisikan menjadi pelaku sekaligus sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk tahun 2013, jumlah penduduk Kecamatan Banguntapan tahun 2013 adalah 131.584 jiwa yang tersebar di 8 (delapan) desa. Dari jumlah tersebut, 66.636 jiwa adalah laki-laki dan 64.948 jiwa adalah perempuan. Laju pertumbuhan penduduk pertahun 3,13 persen. Dengan luas wilayah 28,48 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kecamatan Banguntapan tahun 2013 adalah 4.620 jiwa per km<sup>2</sup>. Apabila dilihat per desa kepadatan penduduk tertinggi ada di Desa Jagalan sebesar 14.167 orang/km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan terendah ada di Desa Jambidan sebesar 2.737 orang / Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di Kecamatan Banguntapan pada level Kabupaten Bantul berada di urutan ke-1, sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Dlingo.

Komposisi penduduk Kecamatan Banguntapan didominasi oleh penduduk muda/dewasa dan usia anak-anak. Rasio ketergantungan penduduk usia produktif di Kecamatan Banguntapan sebesar 40,68 persen, yang menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif (usia 15 – 65 tahun) menanggung sekitar 42 orang yang belum

/tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Itu artinya, beban tanggungan penduduk usia produktif saat ini relatif kecil, dimana 1 orang usia tidak produktif menjadi beban bagi 2 orang usia produktif. Jika dianalogikan dengan sebuah keluarga, dalam kondisi ideal, dua orang yang bekerja hanya menanggung satu orang yang tidak bekerja (penduduk usia 0-14 dan 65+). Hal ini bisa dikatakan bahwa di Kecamatan Banguntapan , dengan angka ketergantungan 42,50 mendapatkan bonus demografi. Konsep bonus demografi adalah suatu kondisi dimana rasio ketergantungan penduduk disuatu daerah kurang dari 50.

Secara umum jumlah penduduk perempuan (64.948 jiwa) di Kecamatan Banguntapan lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk laki-laki ( 66.636 jiwa). Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Angka sex ratio di Kecamatan Banguntapan pada tahun 2013 mencapai 103 persen mempunyai arti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki.

Bersumber data PLKB pada tahun 2013, data keluarga pra sejahtera mencapai 14,43 persen dari total keluarga di Kecamatan Banguntapan. Jika dilihat selama kurun waktu 2012-2013, kecenderungan jumlah keluarga pra sejahtera mengalami penurunan di Kecamatan Banguntapan, tercatat pada tahun 2012 berkisar 3.859 keluarga pra sejahtera dan pada tahun 2013 menjadi 2.704 keluarga.

#### **4. Pendidikan**

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , jumlah TK (swasta dan negeri) di Kecamatan Banguntapan pada Tahun Ajaran 2013/2014 sebanyak 58 unit , Sekolah Dasar (SD) 31 unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 9 unit, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 7 unit. Sedangkan jumlah murid (swasta dan negeri) di Kecamatan Banguntapan pada Tahun Ajaran 2013/2014 berjumlah 3.490 siswa untuk sekolah TK, 8.168

siswa untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 3.391 siswa, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 2.264 siswa.

### **5. Sosial dan Ekonomi**

Kecamatan Banguntapan sebagai bagian bangsa yang majemuk dan beragam, memiliki penduduk yang memeluk dan beribadat beberapa macam agama. Untuk itu sarana peribadatan juga terdapat beberapa macam yang dapat kita temui di Kecamatan Banguntapan. Sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Banguntapan meliputi Masjid 182 unit, Musholla 138 unit, Gereja Katolik 1 unit, Gereja Kristen 3 unit dan Pura 1 unit. Banyaknya sarana ibadah di suatu wilayah menunjukkan tingkat pembangunan pada bidang mental spiritual berjalan dengan baik.

Banyaknya titik-titik sentra perekonomian di Kecamatan Banguntapan karena secara wilayah berdekatan dengan Kota Yogyakarta membuat daya tarik orang untuk bermukim di Kecamatan ini. Komplek perumahan yang berada di Kecamatan Banguntapan sebagai berikut:

- 1) Desa Banguntapan terdapat 14 Komplek Perumahan
- 2) Desa Baturetno terdapat 8 Komplek Perumahan
- 3) Desa Potorono terdapat 10 Komplek Perumahan
- 4) Desa Jambidan terdapat 6 Komplek Perumahan
- 5) Desa Wirokerten terdapat 12 Komplek Perumahan
- 6) Desa Tamanan terdapat 7 Komplek Perumahan
- 7) Desa Singosaren terdapat 3 Komplek Perumahan

Sarana perekonomian yang berupa sarana perdagangan antara lain meliputi pasar, toko swalayan dan toko/warung di Kecamatan Banguntapan masing-masing mencapai 3 unit;



14 unit dan 1.703 unit. Bank dan Koperasi sebagai suatu lembaga perantara keuangan yang akan memperlancar dalam pengembangan usaha mencapai 12 unit bank dan 1 unit koperasi 1 unit BUKP dan 1 Unit BKM Keberadaan industry besar sedang di Kecamatan Banguntapan cukup berkembang, terdapat 12 perusahaan yang cukup menyerap ratusan tenaga kerja.

### C. Kecamatan Sanden

#### 1. Keadaan Geografi

Kecamatan Sanden merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul yang berada di wilayah bagian selatan yang berbatasan dengan:

- 1) sebelah utara : Kecamatan Pandak
- 2) sebelah barat : Kecamatan Srandakan
- 3) sebelah selatan : Samudera Indonesia
- 4) sebelah timur : Kecamatan Kretek

Wilayah Kecamatan Sanden berupa daerah dataran rendah (0-15 meter diatas permukaan laut) yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan pesisir. Kecamatan Sanden beriklim tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Kecamatan ini juga dilalui dua sungai yaitu Sungai Winongo Kecil dan Sungai Opak. Dua sungai tersebut melalui Desa Srigading. Luas wilayah Kecamatan Sanden sebesar 23,16 km<sup>2</sup> (4,57 persen dari total luas Kabupaten Bantul). Kecamatan Sanden terdiri dari 4 desa yaitu:

**Tabel 2.3**  
**Luas Desa di Kecamatan Sanden**

No.	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Presentase
1	Gadingsari	8,12	35,06

2	Gadingharjo	3,08	13,30
3	Srigading	7,58	32,73
4	Murtigading	4,38	18,91
<b>Jumlah</b>		23,16	100,00

*Sumber: Sanden dalam Angka 2014*

## **2. Pemerintahan**

Kecamatan Sanden secara administratif terdiri dari 4 desa meliputi Desa Gadingsari, Desa Gadingharjo, Desa Srigading dan Desa Murtigading. Desa Murtigading adalah ibukota Kecamatan Sanden. Kecamatan Sanden terdiri dari 62 pedukuhan dan 272 Rukun Tetangga (RT). Sebaran pedukuhan dan RT antar desa satu dengan yang lainnya tidak sama. Desa Gadingsari yang merupakan desa terluas mempunyai jumlah RT paling banyak. Sementara itu jumlah pedukuhan terbanyak dimiliki Desa Srigading. Secara rinci, Desa Gadingsari terbagi menjadi 18 pedukuhan dan 92 RT, Desa Gadingharjo menjadi 6 pedukuhan dan 24 RT, Desa Srigading menjadi 20 pedukuhan dan 81 RT, dan Desa Murtigading tersebar dalam 18 pedukuhan dan 75 RT.

## **3. Kependudukan**

Jumlah penduduk Kecamatan Sanden tahun 2013 berdasarkan hasil estimasi adalah 29.939 jiwa, yang terdiri dari 14.690 laki-laki dan 15.249 perempuan. Sex Ratio Kecamatan Sanden adalah 96 persen yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit 4 persen dari penduduk perempuan. Persebaran penduduk Kecamatan Sanden terkonsentrasi di Desa Gadingsari sebesar 31,34 persen, diikuti Desa Srigading sebesar 30,84 persen, Desa Murtigading sebesar 26,23 persen dan Desa Gadingharjo dengan 11,59 persen.

Dengan luas wilayah seluas 23,16 km<sup>2</sup>, yang dihuni oleh 29.939 jiwa, rata-rata kepadatan penduduk Kecamatan Sanden adalah 1.293 jiwa/km<sup>2</sup>. Desa Murtigading mempunyai kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Sanden yaitu 1.793 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian diikuti Desa Srigading dengan 1.218 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk paling rendah adalah Desa Gadingharjo yaitu 1.126 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin**

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Gadingsari	4.556	4.828	9.384
2	Gadingharjo	1.722	1.747	3.469
3	Srigading	4.547	4.686	9.233
4	Murtigading	3.865	3.988	7.853
<b>Total</b>		14.690	15.249	29.939

*Sumber: Sanden dalam Angka 2014*

Bila dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, sebanyak 19.362 jiwa (64,67 persen) penduduk Kecamatan Sanden termasuk usia produktif (15-64 tahun). Pada tahun 2013, rasio beban ketergantungan Kecamatan Sanden adalah 54,63 persen. Rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk bergantung yang berumur kurang dari 15 tahun atau lebih dari 64 tahun terhadap usia kerja yaitu 15-64.

#### **4. Pendidikan**

Ketersediaan fasilitas pendidikan, baik sarana dan prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada tahun 2013, di Kecamatan Sanden terdapat fasilitas sekolah untuk semua jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Selain itu pendidikan pra sekolah seperti taman kanak-

kanak juga terdapat di seluruh desa dengan status sebagai sekolah swasta. Pada tahun 2013, jumlah total taman kanak-kanak di Kecamatan Sanden sebanyak 26 sekolah.

Pada tahun 2013 jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 16 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat sebanyak 6 sekolah, sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 1 sekolah dan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebanyak 2 sekolah. Dalam tiga tahun terakhir tidak ada penambahan atau pengurangan sekolah baik SD, SMP, SMA maupun SMK.

Sementara itu, jumlah murid pada tahun ajaran 2013/2014 mengalami peningkatan pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Penurunan jumlah murid hanya terjadi pada jenjang SMK. Pada tahun ajaran 2013/2014, jumlah murid SD sebanyak 2.703 murid, SMP/sederajat sebanyak 1.470 murid, SMA 584 murid dan SMK sebanyak 344 murid.

## **5. Agama**

Selama tahun 2013 jumlah pernikahan di Kecamatan Sanden sebanyak 218 kejadian dengan persentase kejadian paling banyak terjadi pada bulan Oktober sebesar 15,14 persen. Apabila dilihat per desa, kejadian pernikahan terbanyak terjadi di Desa Gadingsari dengan 74 kejadian. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan tempat ibadah penduduk, di Kecamatan Sanden terdapat 83 masjid dan 58 mushola.

## **6. Sarana Ekonomi**

Sarana ekonomi merupakan fasilitas internal yang dimiliki suatu daerah yang memungkinkan dapat terlaksananya aktivitas ekonomi yang meliputi jalan, pasar, perbankan, energi dan lain-lain. Di daerah pedesaan, pasar tradisional mempunyai peranan penting untuk mendorong ekonomi lokal. Di Kecamatan Sanden, terdapat 4 pasar tradisional yang terletak di Desa Gadingsari 1 buah dan Desa Srigading 3 buah. Peran pasar tradisional tersebut turut

didukung oleh keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 2 buah. Untuk sektor finansial, terdapat 3 bank umum di Kecamatan Sanden yaitu BRI 2 unit dan BPD 1 unit. Untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerah pedesaan akibat dari terbatasnya akses akan ketersediaan permodalan dengan dana yang murah dan mudah, pemerintah mendirikan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pada tahun 2013 jumlah BUKP dan BKM di Kecamatan Sanden sebanyak 6 unit.

#### **D. Kecamatan Imogiri**

##### **1. Keadaan Geografis**

Imogiri merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul yang berada di sebelah Tenggara ibukota kabupaten. Secara geografis, Kecamatan Imogiri berbatasan langsung dengan Kecamatan Pleret dan Jetis sebelah Utara, Kecamatan Dlingo di sebelah Timur, Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul di sebelah Selatan, serta Jetis dan Pundong di sebelah Barat.

Luas Kecamatan Imogiri yaitu 5.449 Ha yang didominasi oleh lahan bukan pertanian seluas 2.199 Ha (40,36%). Selebihnya merupakan lahan sawah seluas 1.098 Ha (20,15%) dan lahan bukan sawah seluas 2.199 Ha (40,36%).

**Tabel 2.5**

**Luas Desa di Kecamatan Imogiri**

<b>No.</b>	<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Presentase</b>
1	Selopamioro	22,75	41,75
2	Sriharjo	6,32	11,60
3	Kebonagung	1,87	3,43
4	Karangtengah	2,88	5,29
5	Girirejo	3,24	5,95

6	Karangtalun	1,21	2,22
7	Imogiri	0,83	1,52
8	Wukirsari	15,39	28,24
<b>Jumlah</b>		54,49	100,00

*Sumber: Imogiri dalam Angka 2014*

## 2. Pemerintahan

Kecamatan Imogiri terdiri dari delapan desa, yaitu Selopamioro, Sriharjo, Kebonagung, Karangtengah, Girirejo, Karangtalun, Imogiri, dan Desa Wukirsari. Dimana Desa Selopamioro merupakan desa terluas dengan luas wilayah mencapai 2.2275 Ha (42%) dari total luas wilayah Kecamatan Imogiri. Sementara Desa Imogiri merupakan desa paling sempit dengan luas wilayah 83 Ha (2%). Jumlah pedukuhan dan RT dari masing-masing desa adalah sebagai berikut:

- 1) Selopamioro terdiri dari 18 padukugan dan 112 RT
- 2) Sriharjo terdiri dari 13 padukuhan dan 62 RT
- 3) Kebonagung terdiri dari 5 padukuhan dan 23 RT
- 4) Karangtengah terdiri dari 6 padukuhan dan 41 RT
- 5) Girirejo terdiri dari 5 padukuhan dan 46 RT
- 6) Karangtalun terdiri dari 4 padukuhan dan 23RT
- 7) Imogiri terdiri dari 4 padukuhan dan 32 RT
- 8) Wukirsari terdiri dari 16 padukuhan dan 95 RT

## 3. Kependudukan

Berdasarkan data estimasi penduduk pada tahun 2013 jumlah penduduk di Kecamatan Imogiri adalah sebanyak 57.534 Jiwa yang terdiri dari 28.472 Jiwa penduduk Laki-laki dan sebanyak 29.062 Jiwa penduduk perempuan. Apabila dilihat dari masing-masing desa, jumlah

penduduk terbanyak terdapat di Desa Wukirsari yaitu sebanyak 15.949 Jiwa dan Desa Karangtalun yaitu sebanyak 2.926 Jiwa.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Pendudukan menurut Jenis Kelamin**

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Selopamioro	6.733	6.881	13.614
2	Sriharjo	4.246	4.423	8.669
3	Kebonagung	1.723	1.779	3.502
4	Karangtengah	2.316	2.371	4.687
5	Girirejo	2.169	2.204	4.373
6	Karangtalun	1.436	1.490	2.926
7	Imogiri	1.862	1.952	3.814
8	Wukirsari	7.987	7.962	15.949
<b>Total</b>		28.472	29.062	57.534

*Sumber: Imogiri dalam Angka 2014*

#### **4. Pendidikan**

Pada Tahun Ajaran 2012/2013, di Kecamatan Imogiri terdapat sebanyak 35 unit Sekolah Taman Kanak-Kanak baik negeri maupun swasta, 6 unit Sekolah Lanjut Tingkat Pertama baik negeri dan swasta, serta 5 unit Sekolah Lanjut Tingkat Atas baik negeri dan swasta. Sementara itu, jumlah murid TK sebanyak 1.693 orang, murid SD sebanyak 4.755 orang, murid SLTP sebanyak 2.243 orang, dan murid SLTA sebanyak 1.716 orang. Sementara itu, jumlah guru TK sebanyak 140 orang, guru SD sebanyak 322 orang, guru SLTP sebanyak 179 orang, dan guru SLTA sebanyak 111 orang.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Sarana Pendidikan Tahun 2012**

No.	Desa	TK	SD	SLTP	SLTA
1	Selopamioro	9	8	1	-
2	Sriharjo	5	4	1	-
3	Kebonagung	3	2	1	-
4	Karangtengah	3	2	-	-
5	Girirejo	4	2	-	-
6	Karangtalun	2	1	-	1
7	Imogiri	3	1	2	2
8	Wukirsari	6	5	1	2
<b>Total</b>					

*Sumber: Imogiri dalam Angka 2013*

## 5. Sosial dan Ekonomi

Kecamatan Imogiri sebagai bagian bangsa yang majemuk dan beragam, memiliki penduduk yang memeluk dan beribadat beberapa macam agama. Untuk itu sarana peribadatan juga terdapat di Kecamatan Imogiri. Sarana peribadatan yang ada meliputi masjid 121 unit, langgar 164 unit, gereja Katholik 2 unit, dan gerja Kristen 1 unit. Sementara itu, sarana perekonomian yang ada di Kecamatan Imogiri sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Sarana Perekonomian Kecamatan Imogiri**



<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2012</b>
Pasar	3
Toko Swalayan	5
Bank Umum/Pengadaian/BPR	3
BUKP/BUKM	1
KUD	1

*Sumber: Imogiri dalam Angka 2013*

## **E. Kecamatan Pajangan**

### **1. Keadaan Geografi**

Kecamatan Pajangan yang secara astronomi keberadaan kantor Kecamatannya terletak di 110°18'19" Bujur Timur dan 07°53'03" Lintang Selatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Bantul. Berdasarkan posisi geografis, Kecamatan Pajangan terletak di bagian paling barat wilayah Kabupaten Bantul. Dengan posisi bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Bantul, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo, bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Kasihan dan Sedayu sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Pandak.

Jika dilihat topografisnya, Kecamatan Pajangan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perbukitan dan hanya sebagian kecil saja berupa dataran. Sungai Progo, sungai utama yang menyusuri wilayah Kecamatan Pajangan dari arah utara sampai selatan. Sungai ini selain memisahkan wilayah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulonprogo juga dimanfaatkan untuk pasokan irigasi dan sumber penghidupan para penggali pasir dan batu. Sedangkan jalur utama lalu lintas antar daerah di wilayah kecamatan, dilalui oleh jalan Pajangan yang merupakan akses utama sebagai penghubung antar wilayah.

Penggunaan lahan di Kecamatan Pajangan sebagian besar digunakan untuk lahan bukan pertanian (bangunan, pekarangan) sebesar 1.897 Ha atau 57,05 persen. Sedangkan

penggunaan lahan untuk lahan sawah 245 Ha (7,37%) dan lahan bukan sawah seluas 1.183 Ha (35,58 %).

## **2. Pemerintahan**

Kecamatan dengan luas wilayah mencapai 6,56 persennya dari wilayah yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 3.325 ha, Kecamatan Pajangan terdiri dari 3 (tiga) desa yaitu Desa Triwidadi 1.271 ha (38,22 %), Desa Sendangsari 1.176 ha (35,37 %) dan Desa Guwosari 878 ha (26,41 %). Ibukota kecamatan berada di Desa Sendangsari. Dari ke-3 desa tersebut, Desa Triwidadi merupakan desa terluas dan desa dengan jumlah pedukuhan dan Rukun Tetangga (RT) terbanyak yaitu masing-masing 22 dusun dan 106 RT. Jumlah pedukuhan dan RT di masing–masing desa sebagai berikut:

- 1) Triwidadi terdiri dari 22 pedukuhan dan 106 RT
- 2) Sendangsari terdiri dari 18 pedukuhan 91 RT
- 3) Guwosari terdiri dari 15 pedukuhan dan 76 RT

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran yang sangat penting dalam kegiatan pelayanan publik di pemerintahan. Aparatur pemerintahan di level desa terdiri dari lurah, carik/sekretaris desa, kabag, dan kepala dukuh. Untuk setiap desa, lurah dan carik masing masing 1 orang, kabag sebanyak 5 orang dan kepala dukuh sebanyak pedukuhan yang ada di masing-masing desa.

Untuk jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Pajangan, ada sebanyak 18 orang dengan rata-rata tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SLA/D1/D2 (55,56

persen). Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar pegawai kantor Kecamatan Pajangan pada tahun 2014 berjenis kelamin laki-laki yaitu 13 orang (72,22 persen) dan perempuan sebanyak 5 orang (27,78 persen).

### **3. Kependudukan**

Berdasarkan data hasil proyeksi Sensus Penduduk, pada tahun 2012 jumlah penduduk Kecamatan Pajangan adalah 34.467 jiwa yang tersebar di 3 (tiga) Desa. Dari jumlah tersebut, 17.096 jiwa adalah laki-laki dan 17.371 jiwa adalah perempuan. Selama periode 2000-2010 tingkat pertumbuhan penduduk tercatat meningkat 1,65 persen. Dengan luas wilayah 33,25 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kecamatan Pajangan tahun 2013 adalah 1.036 jiwa per km<sup>2</sup>. Apabila dilihat per desa kepadatan penduduk tertinggi ada di Desa Guwosari sebesar 1.436 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan terendah ada di Desa Triwidadi sebesar 816 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di Kecamatan Pajangan pada level Kabupaten Bantul berada di urutan ke - 16, berada di atas Kecamatan Dlingo, sedangkan kepadatan terendah dan tertinggi berada di Kecamatan Dlingo dan Banguntapan.

Komposisi penduduk Kecamatan Pajangan didominasi oleh penduduk muda/dewasa dan usia anak-anak. Rasio ketergantungan penduduk usia produktif di Kecamatan Pajangan sebesar 49,43 persen, yang menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) menanggung sekitar 49 orang yang belum/tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 64 tahun ke atas). Itu artinya, beban tanggungan penduduk usia produktif saat ini relatif kecil, dimana 1 orang usia tidak produktif menjadi beban bagi 2 orang usia produktif. Jika dianalogikan dengan sebuah keluarga, dalam kondisi ideal, dua orang yang bekerja hanya menanggung satu orang yang tidak bekerja (penduduk usia 0-14 dan 64+). Jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Pajangan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk

laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih kecil dari 100. Angka sex ratio di Kecamatan Pajangan pada tahun 2013 sebesar 98 persen mempunyai arti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki.

Bersumber data Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul, pada tahun 2013 keluarga pra sejahtera ada sebanyak 18,73 persen dari total keluarga di Kecamatan Pajangan. Hal ini berarti hampir sekitar seperlima dari total keluarga di Kecamatan Pajangan belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk keluarga KS III mencapai 49,14 persen dan KS III plus mencapai 4,34 persen. Secara keseluruhan, kesejahteraan keluarga di Kecamatan Pajangan sudah baik dilihat dari persentase KS III dan KS III+ yang mencapai 50 persen lebih. Perhatian terhadap jumlah tahapan keluarga sejahtera sangat berguna dalam upaya-upaya program penanggulangan kemiskinan, serta program peningkatan kesejahteraan.

#### **4. Pendidikan**

Jumlah Taman Kanak-kanak (swasta dan negeri) di Kecamatan Pajangan pada Tahun Ajaran 2013/2014 sebanyak 24 unit, Sekolah Dasar (SD) 16 unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 3 unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 2 unit. Sedangkan jumlah murid (swasta dan negeri) di Kecamatan Pajangan pada Tahun Ajaran 2013/2014 berjumlah 966 siswa untuk Taman Kanak-kanak (TK), 2.753 siswa untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 1.242 siswa, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 680 siswa.

Berdasarkan rasio murid-guru, tampak beban guru yang mengajar di jenjang pendidikan SD sedikit lebih berat dibandingkan guru yang mengajar pada jenjang pendidikan yang lain. Pada tahun ajaran 2013/2014 rasio murid-guru untuk jenjang pendidikan SD sebesar 15. Angka ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata seorang guru SD harus

mengawasi sebanyak 15 anak didik SD. Untuk jenjang pendidikan SLTP, rasio murid-guru sebesar 14. Sedangkan jenjang pendidikan setingkat SLTA rasio murid terhadap guru mencapai angka 9. Hal ini disebabkan pada jenjang SLTP dan SLTA guru mengajar sesuai dengan bidang studi sedangkan untuk tingkat SD berdasarkan tingkat atau kelas.

## **5. Sosial dan Ekonomi**

Kecamatan Pajangan sebagai bagian bangsa yang majemuk dan beragam, memiliki penduduk yang memeluk dan beribadat beberapa macam agama. Untuk itu sarana peribadatan juga terdapat beberapa macam yang dapat kita temui di Kecamatan Pajangan. Sarana peribadatan yang ada meliputi masjid 70 unit, musholla 70 unit, dan gereja 2 unit. Mayoritas penduduk Kecamatan Pajangan memeluk agama Islam, yaitu sebesar 98,27 persen. Selain itu ada pemeluk agama Katholik sebesar 1,05 persen, Kristen 0,66 persen, dan Hindu 0,01 persen.

Sarana perekonomian yang ada di Kecamatan Pajangan meliputi Pasar Sudimoro yang berada di Desa Triwidadi sebagai pusat kegiatan perdagangan. Sebagai tempat jual beli, tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli yang terletak di desa Triwidadi merupakan satusatunya aset pasar tradisional yang dimiliki oleh Kecamatan Pajangan. Bank dan koperasi sebagai suatu lembaga perantara keuangan yang akan memperlancar dalam pengembangan usaha terdapat masing-masing 2 unit dan 1 unit. Selain itu juga terdapat 1 unit Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) yang membantu permodalan masyarakat bawah, bahkan membantu memerangi masyarakat dari jeratan rentenir dan pengijon.

Aset yang lain dari sarana perekonomian di Kecamatan Pajangan adalah jasa akomodasi lainnya yang berupa penginapan/hotel, terdapat di desa wisata Dusun Krebet sebagai tempat menginap wisatawan yang datang dan ingin mengenal lebih jauh sentra

kerajinan batik kayu. Industri Besar Sedang di Kecamatan Pajangan sejumlah 6 perusahaan. Sedangkan aset obyek wisata berupa wisata alam yaitu Goa Selarong yang berada di Desa Guwosari

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian terkait dengan tingkat partisipasi pemilih beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dijabarkan berbasis kecamatan yang menjadi sampel area penelitian. Adapun detailnya sebagai berikut:

#### **A. Kecamatan Banguntapan**

Desa Jambidan dan Desa Banguntapan memiliki tingkat partisipasi dalam pemilu dan karakteristik penduduk yang berbeda. Desa Banguntapan cenderung memiliki banyak warga urban/pendatang yang pada saat pemilihan tidak digunakan hak pilihnya. Masyarakat Desa Banguntapan kebanyakan tidak mengurus pemindahan daftar pemilih tetapnya. Selain itu para Caleg tidak begitu terkenal dan intens masuk di tengah-tengah masyarakat. Berbeda dengan Desa Jambidan yang memiliki tingkat partisipasi tinggi karena salah satu Caleg merupakan mantan lurah dan sangat terkenal di masyarakat. Memilih adalah kewajiban juga dijadikan alasan oleh masyarakat untuk memilih pada saat Pemilu dan upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Salah satu yang melatarbelakangi partisipasi adalah latar belakang pendidikan yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Ini dapat dilihat dari Desa Jambidan dan Banguntapan yang rata-rata memiliki pendidikan terakhir SLTA dan Sarjana. Selain itu ditemui juga masyarakat yang memiliki pendidikan terakhir SLTP tetapi pengetahuan politik dan alasan berpartisipasi cukup baik karena pengalaman organisasi sebagai aparat pemerintah seperti terlibat dalam Badan Permusyawaratan Desa.

(Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bpk. H. Sabardi Desa Banguntapan pada Senin, tanggal 25 Mei 2015 pukul 14.30 WIB).

Alasan lain yang mendasari ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut adalah memiliki kesadaran politik. Pada Desa Jambidan masyarakat cenderung menganggap bahwa berpartisipasi adalah kewajiban. Anggapan bahwa kewajiban sebagai masyarakat dalam memilih pemimpin yang terbaik dan bertanggungjawab kepada Negara terutama dalam pemilihan presiden. Sementara dalam Pemilihan legislatif alasan yang mendasari adalah memprioritaskan dengan memilih Caleg yang berasal dari daerah yang sama. Dengan alasan bahwa Caleg tersebut mampu membangun dan memahami kondisi daerah. Sementara pada Desa Banguntapan kesadarannya masih rendah, banyak masyarakat pendatang yang tidak mengurus surat pindahan untuk dapat memilih di TPS Desa Banguntapan. Hal inilah yang menyebabkan partisipasi di Banguntapan masih rendah.

Secara keseluruhan situasi lingkungan dalam berpartisipasi Pemilu 2014 sangat kondusif dan tidak ada ancaman. Ini dibuktikan dengan adanya kedewasaan berpolitik yang cukup tinggi. Akan tetapi situasi yang dirasakan kondusif hanya terkesan terlihat oleh kasat mata. Karena kebanyakan masyarakat memilih bukan melalui hati nurani maupun upaya perbaikan pada Negara. Melainkan beberapa partai politik telah melakukan adanya doktrin maupun dorongan dalam mengarahkan untuk memilih Caleg atau Capres melalui pemberian uang maupun sembako pada masyarakat.(Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sutrisno Desa Jambidan pada Senin, 25 Mei 2015 pukul 16.20 WIB).

Pertimbangan yang digunakan dalam memilih parpol adalah memilih sesuai dengan visi misi dari Parpol. Namun kepercayaan kepada Parpol sangat rendah karena baginya memilih figur melalui bukti nyata untuk mau terjun ke masyarakat jauh lebih penting.



(Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Muhduido Desa Jambitan pada Minggu, 24 Mei 2015 pukul 18.30 WIB). Namun ada juga yang beranggapan bahwa partai politik pada pemilu 2014 lalu sudah memiliki visi dan misi yang baik, sementara figur politik tidak mampu mewujudkan visi dan misi parpol tersebut, upaya untuk perbaikan kualitas dari aktor politik sangat diharapkan dari masyarakat. (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Phutut Damarjati Desa Banguntapan pada Senin, 25 Mei 2015 pukul 13.00 WIB).

Dalam pengambilan keputusan untuk berpartisipasi dalam pemilu, orang terdekat sangat lah berpengaruh. Situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman( Surbakti, 1992). Namun dalam kenyataannya berdasarkan hasil wawancara informan bahwa dalam pengambilan keputusan pemilu 2014, walaupun ada teman yang ikut dalam caleg dan meminta ajakan untuk memilih, hal itu sangat tidak berpengaruh, karena melihat kinerja dari caleg dalam kehidupan kesehariannya jauh lebih penting alasan yang mendasari untuk memilih. (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu S. J. Eka Kurniawati Desa Banguntapan pada Minggu, 24 Mei 2015 pukul 16.00 WIB). Hal ini juga dikuatkan dengan anggapan bahwa dalam pengambilan keputusan pemilu 2014 walaupun banyak meminta dukungan, tetapi tetap memilih untuk netral. (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bpk. H. Sabardi Desa Banguntapan pada Senin, tanggal 25 Mei 2015 pukul 14.30 WIB).

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara menyangkut tentang adanya pengetahuan seseorang dalam lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup (Hendrik, 2010). Dalam berpartisipasi pemilu, merupakan kewajiban sebagai warga negara

dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Phutut Damarjati Desa Banguntapan pada Senin, 25 Mei 2015 pukul 13.00 WIB). Selain itu, ada juga yang beranggapan bahwa berpartisipasi pemilu juga merupakan hak sebagai warga negara dalam menyalurkan aspirasi. (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Muhduido Desa Jambitan pada Minggu, 24 Mei 2015 pukul 18.30 WIB). Berpartisipasi juga merupakan hak, karena apabila digunakan maka sangat baik untuk memilih pemimpin yang terbaik. Apabila tidak juga tidak ada masalah, tergantung dari masing-masing orang.

Tahapan pemilu seharusnya adalah :

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyuluhan daftarpemilih.
2. Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu
3. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
4. Pencalonan anggota DPRM DPD, DPRD Provinsidan DPRD kabupaten/kota.
5. Masa kampanye
6. Masa tenang
7. Pemungutan dan perhitungan suara.
8. Penetapan hasil Pemilu
9. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPRD, Provinsidan DPRD Kabupaten/kota

Proses Pemilu diawali dengan verifikasi Caleg, Persiapan Daftar Pemilih Tetap, DPS, DPT, persiapan sosialisasi, logistik, pengumuman dan perhitungan. Tahapan pemilu yang diketahui berdasarkan pengalaman menjadi anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara). (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu S. J. Eka Kurniawati Desa Banguntapan pada Minggu, 24 Mei 2015 pukul 16.00 WIB). Proses Pemilu dilakukan berdasarkan proses pendaftaran pemilih, ditetapkan DPT, Pembentukan KPPS, melakukan pemilihan pada TPS

hingga perhitungan suara. (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Muhduido Desa Jambidan pada Minggu, 24 Mei 2015 pukul 16.00 WIB).

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang sangat penting bagi masyarakat, karena merupakan sarana demokrasi tertinggi dalam memilih presiden maupun legislatif. (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sutrisno Desa Jambitan pada Senin, 25 Mei 2015 pukul 16.20 WIB). Namun ada juga yang beranggapan bahwa dalam adanya pemilu kepala daerah tidak penting di laksanakan, karena kita memiliki wakil rakyat yang di percayai masyarakat untuk memilih kepala daerah dan sebaiknya dana yang digunakan untuk adanya pemilu kepala daerah digunakan untuk memperbaiki adanya infrastruktur. (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Muhduido Desa Jambitan pada Minggu, 24 Mei 2015 pukul 18.30 WIB).

Dalam tahapan pemilu, apabila merasa dirugikan akan melaporkan kepada pengurus/ panitia pemilu desa, karena berpartisipasi pemilu merupakan adanya hak sebagai warga negara. (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Sutrisno Desa Jambitan pada Senin, 25 Mei 2015 pukul 16.20 WIB). Ada juga yang beranggapan, untuk tetap memperjuangkan haknya dengan melakukan rekomendasi untuk datang ke KPUD. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Phutut Damarjati Desa Banguntapan pada Senin, 25 Mei 2015 pukul 13.00 WIB).

Secara keseluruhan informan mengikuti berita secara intens, dalam mengikuti berita pemilu sangat intens untuk mengetahui proses dari awal sampai akhir perkembangan pemilu, karena baginya itu sangat penting sebagai panitia Pemungutan suara. Akan tetapi, setiap media massa, memberikan berita yang tidak netral dan cenderung lebih pada pilihan masing-masing. (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu S. J. Eka Kurniawati Desa Banguntapan

pada Minggu, 24 Mei 2015 pukul 16.00 WIB). Intens dalam mengikuti berita pemilu, Seperti televisi, tetapi dengan memilih-milih dalam menonton berita pemilu. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bpk. Suharsono Desa Jambidan pada Senin, 25 Mei 2015 pukul 18.00 WIB).

Dampak positif dari hasil pemilu, untuk daerah komunikasi antara masyarakat dan para wakil rakyat dapat tersalurkan. Untuk pusat, tidak banyak yang diharapkan dari pemerintah pusat. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Phutut Damarjati Desa Banguntapan pada Senin, 25 Mei 2015 pukul 13.00 WIB). Namun berbeda dengan informan yang lain yang tidak merasakan dampak positif berdasarkan hasil pemilu 2014. (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Phutut Damarjati Desa Banguntapan pada Senin, 25 Mei 2015 pukul 13.00 WIB).

Dengan terinformasikannya pemilu secara luas terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan serta cara pemilihan serta informasi yang lain terkait dengan pemilu, maka akan berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang pemilu yang akan berdampak terhadap partisipasi sendiri (Hendrik, 2010). Mendapatkan informasi dari adanya rapat-rapat kecamatan, atau koran- koran yang sering dibaca (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bpk. H. Sabardi Desa Banguntapan pada Senin, tanggal 25 Mei 2015 pukul 14.30 WIB). Selain itu juga didapatkan informasi tentang pemilu melalui dari KPUD, media cetak, media massa..(Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Muhduido Desa Jambidan pada Minggu, 24 Mei 2015 pukul 18.30 WIB).

Berdasarkan hasil penelitian dari informan bahwa yang sering melakukan adanya sosialisasi adalah KPUD dan belum dirasakan cukup karena hanya melewati koran dan belum mendetail, Selain itu hanya ada 1 prpol yang melakukan sosialisasi terjun ke masyarakat

(Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu S. J. Eka Kurniawati Desa Banguntapan pada Minggu, 24 Mei 2015 pukul 16.00 WIB). KPUD melakukan adanya sosialisasi tapi belum dirasa cukup, karena dalam melakukan sosialisasi KPUD mendekati hari H pemilu, selain itu juga adanya keterbatasan KPUD dalam menjangkau masyarakat sampai tingkat RT, karena pada kenyataannya KPUD melakukan sosialisasi hanya sebatas desa. (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Phutut Damarjati Desa Banguntapan pada Senin, 25 Mei 2015 pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil penelitian dari informan bahwa Sosialisasi menarik seharusnya adanya alat peraga dan juga terjun ke daerah- daerah terpencil, dan dikelompokkan kedalam kelompo-kelompok seperti pemilih pemula, perempuan, lansia, agar memudahkan masyarakat untuk mencerna penjelsan sosialisasi tentang pemilu.(Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu S. J. Eka Kurniawati Desa Banguntapan pada Minggu, 24 Mei 2015 pukul 16.00 WIB). Sosialisasi yang menarik tidak hanya sampai di desa tapi juga menghadirkan mayarakat yang banyak sampai tingkat RT. . (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Phutut Damarjati Desa Banguntapan pada Senin, 25 Mei 2015 pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil penelitian dari informan, tidak ada satupun yang mendapatkan adanya bantuan, uang menjelang pemilu. Berbagai Partisipasi politik pada Kecamatan Banguntaman sangat tinggi, dan faKtor yang paling tinggi adalah sosial ekonomi, kondisi masyarakat, kesadaranterkait pengalaman dalam Pemilu, situasi dan kesadaran politik.

Harapan untuk Partai Politik :

- Mampu meningkatkan keterlibatan dengan masyarakat yang dapat meningkatkan partsisipasi msyarakat terutama di Desa Banguntapan.

- Mencari simpati masyarakat dengan terjun secara langsung.
- Kadernya harus berkualitas.

#### Harapan untuk KPUD

- Dari awal harus memberikan informasi pada masyarakat tentang pengurusan pindah pemilih terutama pada Desa Banguntapan yang banyak memilih untuk golput.
- KPUD tetap netral, kerja keras untuk turun ke masyarakat
- Pembentukan PPS harus lewat surat tidak hanya lewat SMS.

#### **B. Kecamatan Sanden**

Tingginya angka partisipasi pemilu di Gading Sari dilatar belakangi dengan jumlah penduduknya tiga kali lipat lebih banyak dari pada Desa Gading Arjo. Jumlah partisipasi warga desa Gading Sari didalam pemilu 2014 kemarin mencapai angka sekitar 78%. Berbeda sekitar 2% dari Desa Gading Arjo. Desa Gading Arjo ini memiliki angka partisipasi politik lebih rendah dari pada desa Gading Arjo, dikarenakan di desa tersebut ada satu pedukuhan yakni pedukuhan Karang Anyar yang sebagian generasi mudanya/generasi usia produktif bekerja diluar negeri, sedangkan warga yang bekerja di luar negeri tersebut masih terdaftar sebagai pemilih tetap di Desa Gading Arjo. Pedukuhan Karang Anyar merupakan pedukuhan dengan jumlah penduduk paling besar dibanding pedukuhan lain dari Gading Arjo. Sehingga hal ini mempengaruhi jumlah tingkat partisipasi politik di Desa Gading Arjo menjadi rendah.

Faktor Determinan yang mempengaruhi tingginya angka partisipasi masyarakat Gading Sari yakni antara lain intensitas sosialisasi tinggi yang dilakukan jauh hari sebelum

pemilu dan mobilitas penduduk rendah. Sedangkan faktor determinan yang mempengaruhi rendahnya angka partisipasi pemilihan pada Desa Gading Arjo yakni antara lain pragmatisme (manfaat yang didapatkan rendah), mobilitas masyarakat tinggi (sebagai nelayan) dan sosialisasi di Desa Gading Arjo kurang (masyarakat susah ditemui). Adapun wilayah Gading Sari memiliki angka partisipasi pemilihan umum yang cenderung lebih tinggi dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Sanden hal ini dikarenakan adanya peran penting Pamong Desa, Tokoh Agama seperti Kyai, Ketua Takmir Masjid di dua desa tersebut, Sedangkan di desa Gading Sari di bagian kampung nelayan ada satu tokoh yang cukup berpengaruh yakni ketua POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata).

Alasan yang mendasari partisipasi dalam pemilu berdasarkan jawaban dan penjelasan dari narasumber dengan berbagai macam tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa di desa Gading Sari, Gading Arjo, dan Murti Gading, seluruh narasumber telah mengikuti Pemilu pada tahun 2014 kemarin. Mereka memahami bahwa Pemilu itu penting dan seluruh narasumber mengatakan tujuan utama mereka mengikuti Pemilu adalah untuk memilih pemimpin. Alasan lain yang dikemukakan oleh seluruh narasumber secara garis besar mengatakan bahwa mereka mengikuti Pemilu karena mereka menyadari posisinya sebagai warga negara yang harus berpartisipasi dalam Pemilu. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa narasumber sudah memiliki kesadaran dari diri mereka sendiri untuk mengikuti Pemilu.

Kondusifitas situasi lingkungan pemilu di ketiga desa tersebut, baik menjelang Pemilu, pada saat pelaksanaan Pemilu, serta pasca Pemilu. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kondisi dan situasi di ketiga desa tersebut menjelang Pemilu ternyata kondusif, aman, dan tenang. Tidak ada kegaduhan atau keributan yang disebabkan hal-hal yang berkaitan dengan Pemilu, Sedangkan salah seorang narasumber yakni Dasuki dari Desa

Gading Arjo mengatakan bahwa di TPS 1 Gading Arjo, Sanden, Bantul terjadi kegaduhan akibat salah seorang saksi datang terlambat pada saat Pemilu berlangsung.

Afiliasi politik orang terdekat tidak terlalu berpengaruh di desa Gading Arjo, maupun Gading Sari. Dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu mereka menggunakan hak pilih secara bebas tanpa adanya intimidasi ataupun desakan dari pihak manapun, baik dari rekan terdekat ataupun oknum-oknum tertentu untuk memilih suatu partai politik atau calon tertentu.

Akan tetapi, ada catatan penting dimana salah seorang narasumber yakni Kasiran dari desa Gading Sari yang pada saat Pemilu menjadi Ketua PPS Gading Sari, mengalami intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang ingin melihat hasil rekapitulasi suara tanpa memiliki legalitas. Pihak-pihak tersebut antara lain oknum polisi, oknum koramil, dan anak dari salah seorang caleg.

Kesadaran politik tentang pemilu (hak atau kewajiban) masyarakat dari tiga desa kecamatan sanden ini mereka memiliki pendapat bahwa menurut responden kebanyakan dari narasumber menjawab bahwa berpartisipasi pemilu itu merupakan hak dan kewajiban, karena ketika berbicara tentang hak Pemilihan Umum untuk seorang pemimpin, rakyat memiliki hak untuk memberikan pilihan sebagai Negara Demokrasi, namun, sebagaimana narasumber memiliki pendapat dalam pemilihan umum yakni merupakan suatu kewajiban karena setiap negara yang baik, wajib memiliki seorang pemimpin karena dengan pemimpin nanti yang akan menentukan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan yang diajarkan oleh setiap agama.

Pengetahuan tentang proses pemilu, dari masyarakat Kecamatan Sanden baik dari kalangan pendidikan rendah maupun tinggi, baik memiliki dari kalangan menengah keatas



atau bahkan kebawah sekalipun sebagaimana besar dari narasumber kami mengemukakan bahwa mereka mengetahui proses pemilihan umum dari awal hingga rekapitulasi pemilihan umum, hal ini dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki keinginan untuk berpartisipasi politik yang secara sadar dalam pemilihan umum. Selain sadar berpartisipasi peran penyelenggara pemilu yang intensif membuat warga Gading Arjo, Gading Sari dan Murtigading ini memiliki angka pemilhan umum yang tinggi. Karena sosialisasi politik merupakan proses mempengaruhi individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksi terhadap gejala gejala politik.<sup>1</sup>

Dampak dari pemilu terhadap masyarakat desa sanden, dalam tingkat pemerintahan pusat hanya satu banding lima yang menyatakan merasakan dampak positif dari pemilihan umum secara tingkat pusat yakni menerima bantuan uang langsung dari pemerintah karena tergolong masyarakat kurang mampu, dan dampak positif yang positif dari pemerintah daerah yang belum terasakan secara langsung oleh masyarakat desa khususnya, hanya saja ketika peresmian acara dari pemerintah daerah akan hadir dalam rangka *controlling* terhadap masyarakat desa dan terkait implementasi atau prosesnya hanya beberapa dari pemerintah daerah yang ikut turun dalam pelaksanaannya.

### **C. Kecamatan Imogiri**

Partisipasi pemilih di Indonesia sejak pemilu 1999 sampai dengan 2014 bergerak fluktuatif. Pada pemilu legislatif, penurunan partisipasi pemilih sekitar 10% konsisten terjadi sampai pada pemilu 2009. Sementara itu pada pemilu 2014, angka partisipasinya naik 5%. Pada kasus pilpres, tercatat dalam pemilu pertama kalinya dalam sejarah angka partisipasinya lebih

---

<sup>1</sup> Diktat Matakuliah Sistem Politik Indonesia, Awang Darumurti, hal.10

rendah dibandingkan pemilu legislatif. Fluktuasi tersebut juga bisa dilihat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif 2014 kabupaten Bantul menduduki peringkat kedua di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan 81,24 persen. Dalam hal partisipasi pemilih, responden menyatakan telah menyalurkan hak suaranya dalam pemilu legislatif dan pilpres tahun 2014. Temuan menariknya adalah untuk kecamatan Imogiri, yang paling menonjol adalah desa Sriharjo dimana mayoritas yang tidak menyuarakan haknya dalam pemilu 2014 lalu adalah dari masyarakat biasa. Bukan elit atau bahkan pejabat perangkat pemerintahan baik dari tingkat desa sampai rukun tetangga dan warga. Adapun alasan masyarakat kecamatan Imogiri mengikuti pemilu karena mereka rata-rata menganggap bahwa mereka ikut pemilu karna mereka menganggap itu adalah sebuah hak untuk berwarga negara dan kewajiban untuk membangun pemerintah.

Kondisi Kecamatan Imogiri secara keseluruhan dapat dikatakan kondusif dan tidak ada gangguan maupun ancaman. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh oleh Suriyadi selaku anggota PPK Kecamatan Imogiri. Kondisi pada masyarakat Imogiri tingkat fanatisme terhadap partai cukup rendah. Lain halnya yang disampaikan oleh Pramono Harianto, Ketua Rukun Tetangga 05, Dusun Paseban, Desa Imogiri ini memberikan penjelasan tentang tingkat kondusif dari wilayah Imogiri karena didasarkan oleh aspek kesiapan dari perangkat desa sampai rukun tetangga dan warga untuk menanggulangi dari kondisi tidak kondusif. Tindakan yang dilakukan adalah dengan bersikap netral dalam pemilihan umum serta berusaha jujur jika dijadikan petugas pemungutan suara. Walaupun secara umum didalam fungsi pemilu adalah sebagai implementasi dari perwujudan rakyat, sarana membentuk perwakilan politik, sarana untuk melakukan pergantian kepemimpinan memperoleh legitimasi dan bagi yang dipilih serta partisipasi politik untuk mengawal

kebijakan. (*Hasil wawancara dengan Suryadi, Minggu 24 Mei 2015 pukul 09.30 dan Pramono Harianto, Minggu 24 Mei 2015 pukul 13.15*)

Kondisi ini disebabkan karena masyarakat di Imogiri khususnya di Desa Sriharjo menganggap bahwa pemilihan umum presiden dan pemilihan legislatif (DPR RI) merasa kurang menyentuh pada sektor masyarakat golongan bawah artinya, konektivitas dengan masyarakat dirasa kurang intensif dibandingkan pemilihan kepala desa atau bupati. Sejalan dengan hal itu, Basharudin selaku kepala Dusun Miri, Desa Sriharjo juga mengungkapkan bahwa kecenderungan tidak memilih di Desa Sriharjo karena kejenuhan masyarakat akan output dari pemilu legislatif dan presiden yang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Banyaknya janji yang tidak ditepati serta *money politik* yang gencar dilakukan juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin berkurang terhadap pemilu tahun 2014 lalu. selain itu banyaknya masyarakat Sriharjo yang merantau dan kurangnya penanganan pada masyarakat yang sudah lanjut usia juga mempengaruhi dari tingkat partisipasi politik di Sriharjo. Menurut Sugeng Parjianto, anggota panitia pemungutan suara desa Sriharjo, kepuasan masyarakat akan hasil produk dari pemilu legislatif dan presiden jauh berbeda dengan produk kepala desa dan bupati karena programnya langsung bersifat implementatif dan dirasakan oleh masyarakat. (*Hasil wawancara dengan Sugeng Parjianto, Minggu 24 Mei 2015 pukul 10.30 dan Basharudin, Minggu 24 Mei 2015 pukul 16.40*)

Suryadi, selaku anggota PPK kecamatan dan Budi Purwanto, selaku ketua panitia pengawas pemilu Kecamatan Imogiri menceritakan tentang fenomena *money politik* di Kecamatan Imogiri cukup gencar. Ada beberapa desa yang telah diproyeksikan untuk menjadi basis dari partai tertentu untuk menjadi lumbung suara. Akan tetapi, fenomena yang ada justru berbanding terbalik dengan hasil yang ada dilapangan. Alhasil kemenangan yang

diinginkan oleh beberapa partai yang sudah diadakan kontrak politik dengan perangkat dusun dan pemilih justru kalah dengan selebar uang Rp. 20.000,00-50.000,00 sebelum pemilih akan menentukan pilihannya. Menurut Budi Purwanto, Hampir semua partai politik di Imogiri dan calon legislatif (caleg) melakukan *money politik*, akan tetapi kondisi di Kecamatan Imogiri justru tidak ada ketegangan/perselisihan antar partai. Perangkat dusun menyasati beberapa partai yang melakukan kontrak politik dibagi suranya di wilayahnya secara merata. (*Hasil wawancara dengan Suryadi, Minggu 24 Mei 2015 pukul 10.00 dan Budi Purwanto, Minggu 24 Mei 2015 pukul 15.00*)

Sebagai contoh dusun A, membagi perolehan suara partai A, B, dan C di semua wilayah dusunnya. Beberapa desa atau dusun justru ada yang bertindak *mainstream* dengan mengencarkan *take line*, ambil uangnya jangan pilih orangnya. Tipologi pemilih dalam menentukan pilihannya dalam pemilu dalam Firmansyah (2012:120-126) terbagi 4 (empat) yaitu pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional dan pemilih skeptis. Katerori memilih di Imogiri secara umum dapat dikategorikan sebagai pemilih rasional hal ini diungkapkan oleh Suryadi, Sugeng Partjianto, Basharudin dan Budi Purwanto, yang menganggap bahwa memilih adalah hak dan kewajiban. Maka dari itu memilih harus didasarkan pada integritas calon, keagamaan/moralitas, pengalaman/*trade record* , jujur tanpa ada kasus dan memiliki kapabilitas. Sedangkan menurut penuturan dari Pramono Harianto, penentuan pilihan dalam pemilu harus didasarkan pada kedekatan secara sosiologis dan asal usul. (*Hasil wawancara dengan Suryadi, Minggu 24 Mei 2015 pukul 10.00, Sugeng Parjianto, Minggu 24 Mei 2015 pukul 11.15, Basharudin, Minggu 24 Mei 2015 pukul 17.05 dan Budi Purwanto, Minggu 24 Mei 2015 pukul 15.45, Pramono Harianto, Minggu 24 Mei 2015 pukul 14.00*)

Adapun tahapan di dalam pemilu secara singkat menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2012 tersebut:

1. Pendaftaran Pemilih.
2. Masa Kampanye.
3. Pemungutan Suara.
4. Perhitungan Suara.
5. Penetapan Hasil Pemilu.

Tahapan-tahapan pemilu yang telah dijelaskan diatas sangat relevan dengan beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Suryadi dan Sugeng Parjianto. Akan tetapi didalam penjelasannya, pernyataan Suryadi dan Sugeng Parjianto tidak secara detail menjelaskan mengenai tahapan pemilu. Jawaban yang mereka sampaikan belum menyentuh pada sektor penyelesaian dan penetapan pemenang dalam pemilu 2014. Lain halnya yang disampaikan oleh Pramono Herianto dan Budi Purwanto yang menjelaskan tahapan pemilu dari segi konteks persiapan dan pelaksanaan. Pada dasarnya semua responden mengerti tentang tahapan pemilu baik pilpres/pileg pada tahun 2014 yang lalu, hanya saja penjelasan teknisnya tidak mendetail dan menyentuh pada sektor penyelesaian maupun penetapan. Selain itu ada beberapa hal menarik tentang pelaksanaan pemilu 2014 yaitu mengenai dirugikan atau tidaknya dalam pelaksanaan pemilu 2014. Dikemukakan oleh Suryadi bahwa pada saat pemilu tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tetapi, ada satu kasus yang mengharuskan untuk diadakan klarifikasi yaitu saat surat suara diprotes oleh saksi partai tertentu karena berita acara dari PPK Imogiri dan saksi partai salah satu partai hasilnya berbeda. Setelah diadakan pengecekan ternyata saksi memalsukan berita acara yang sebenarnya dan capnya kering/fotocopyan. Satu caleg dari partai pemrotes ditambah semua suaranya misalkan 11

jadi 111 dan seterusnya dan itu tidak tindak oleh KPUD. (*Hasil wawancara dengan Suryadi, Minggu 24 Mei 2015 pukul 10.10, Sugeng Parjianto, Minggu 24 Mei 2015 pukul 11.20, Basharudin, Minggu 24 Mei 2015 pukul 17.15 dan Budi Purwanto, Minggu 24 Mei 2015 pukul 16.00, Pramono Harianto, Minggu 24 Mei 2015 puku 14.30*)

Sedangkan menurut Sugeng Parjianto, sebagai PPS desa Sriharjo merasa dirugikan dengan berbagai hal yaitu: regulasi KPU yang selalu berubah-ubah, mulai dari awal mendata pemilih sampai diatas berubah lagi yang sudah meninggal muncul kembali karena data masternya dari KPU pusat. Data dari bawah sudah fiks dan final sesuai dengan realita dilapangan sampai hari H masih muncul lagi. Permasalahan selanjutya diterangkan oleh Pramono Harianto yaitu tertukarnya dapil calon legislatif karena kesalahan sortir surat suara dari kpud sehingga diharuskan pemilihan ulang di 2 TPS desa Sriharjo. Dari keterangan ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Imogiri, Budi Purwanto mengatakan merasa dirugikan karena rekomendasi dari PANWAS banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh KPUD, seperti: penertiban baliho/spanduk, *money politic* maupun jadwal kampanye.

Dari hasil pemilu tahun 2014 secara keseluruhan dampak positifnya, menurut penuturan dari Suryadi, justru janji-janji calon legislatif yang sudah terwujud adalah yang tidak lolos menjadi anggota dewan perwakilan rakyat. Berbeda halnya dengan Sugeng Parjianto dan Basharudin yang belum melihat dan pesimis harapan masyarakat Sriharjo justru tidak akan terealisasi. Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014, sosialisasi pemilu oleh KPUD Bantul memang dinilai belum efektif karna memang tidak secara merata sampai level Rukun Tetangga/Rukun Warga. Beberapa rekomendasi telah disampaikan oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemilu kedepan. Disampaikan oleh Sugeng Parjianto, bahwa sosialisasi KPUD seharusnya mengadakan Simulasi/Praktek mencoblos jauh hari sebelum pelaksanaan

pemilu bukan justru bersifat mendadak seperti di sampaikan oleh Suryadi bahwa simulasi dilaksanakan 2 hari sebelum pelaksanaan pemilu. . *(Hasil wawancara dengan Suryadi, Minggu 24 Mei 2015 pukul 10.20, Sugeng Parjianto, Minggu 24 Mei 2015 pukul 11.30)*

Pramono Harianto merekomendasikan untuk kedepan pemilu harus berjalan lebih jujur dan adil, secara anggaran sosialisasi didukung misalkan untuk sosialisasi yang dilakukan menurut Sugeng Parjianto harus lebih inovatif dan kreatif, penjelasan singkatnya adalah mendatangkan badut/pemeran lawak untuk menarik masyarakat mengikuti kegiatan simulasi. Berbeda halnya yang disampaikan oleh Pramono Harianto dan Suryadi yang menghendaki pendataan calon pemilih berasal dari *bottom up*/unsur Rumpun tetangga/rumpun warga agar datanya valid dan terbaru. Sedangkan yang disampaikan oleh Budi Purwanto, menghendaki adanya tindak lanjut dari KPUD terkait laporan, rekomendasi pelanggaran serta berbagai hal terkait kecurangan kedepan harus ada penindakan, KPPS/PPS minimal lulusan SMP/SMA yang mengerti komputer dan internet laporan saksi melalui LPSK dan regulasi terkait KPU harus diperbaiki sistemnya. Penanganan pemilih yang sudah berusia lanjut juga harus diperhatikan seperti disampaikan oleh Basharudin selaku kepala dusun Miri, Sriharjo. Salah satu yang menjadi kendala adalah pemilih usia lanjut tidak difasilitasi untuk memilih seperti yang dilakukan oleh PPS desa Selopamioro dengan metode jemput pemilih. *(Hasil wawancara dengan Suryadi, Minggu 24 Mei 2015 pukul 10.10, Sugeng Parjianto, Minggu 24 Mei 2015 pukul 11.20, Pramono Harianto, Minggu 24 Mei 2015 pukul 14.45)*

Berdasarkan temuan di masyarakat pengaruh tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2014 di kecamatan Imogiri adalah tingginya tingkat partisipasi dikarenakan tingkat pendidikan yang cukup baik, sosialisasi intensif oleh RT, PPS, RT harus dijalankan optimal caranya adalah dengan menjadikan ketua RT/RW menjadi KPPS, sumber daya

manusia yang baik , tingginya afiliasi terhadap orang terdekat, wilayahnya kecil hanya terdiri dari 9 (sembilan) TPS. Kesadaran yang tinggi serta situasi yang kondusif sebagaimana di dalam teori yang menyebabkan seseorang mau atau tidaknya berpartisipasi dalam politik menurut Surbakti, 1992.

Sedangkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih disebabkan oleh tingkat kejenuhan masyarakat yang sering diberi janji-janji oleh calon legislatif yang tidak ditepati, waktu yang terlalu singkat dalam pemilihan ( hanya sampai pukul 12.00), letak geografis, rendahnya tingkat pendidikan, banyaknya perantau yang tidak mudik saat pemilihan umum,, masyarakat yang sudah meninggal masih dimasukkan dalam data, tidak punya nomor induk kependudukan, dan kesalahan pendataan seperti, masyarakat yang sudah meninggal masih dimasukkan dalam data serta tidak punya nomor induk kependudukan. Sedangkan temuan menarik dari justifikasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa/Bupati bisa memastikan bahwa tingkat partisipasi di desa Sriharjo dipastikan akan naik tajam karena dipandang berimplikasi terhadap pembangunan desa dan dipandang lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk para perantau yang akan pulang ketika adanya pemilihan kepala desa/bupati (Masyarakat relatif rasional sehingga memilih atau menghitung perlunya atau tidak perlunya datang ke TPS). *(Hasil wawancara dengan Suryadi, Minggu 24 Mei 2015 pukul 10.10, Sugeng Parjianto, Minggu 24 Mei 2015 pukul 11.20, Basharudin, Minggu 24 Mei 2015 pukul 17.15 dan Budi Purwanto, Minggu 24 Mei 2015 pukul 16.00, Pramono Harianto, Minggu 24 Mei 2015 puku 14.30)*



#### **D. Kecamatan Pajangan**

Kecamatan Pajangan merupakan salah satu dari tujuh belas kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Kecamatan yang berada disebelah barat Ibukota Kabupaten Bantul ini memiliki tiga desa yaitu Desa Triwidadi, Desa Sendangsari dan Desa Guwosari. Sesuai data tahun 2013, Kecamatan Pajangan memiliki 32.501 jiwa yang terdiri dari 9.792 KK. Dari hasil penelitian, Kecamatan Pajangan memperoleh tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat tinggi daripada Kecamatan yang lainnya yang ada di Kabupaten Bantul dan Kecamatan Pajangan ini dijadikan sebagai daerah kontrol dalam penelitian ini.

Kecamatan Pajangan tersebut bisa memperoleh tingkat partisipasi yang tinggi didasarkan atas beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilu. “Masyarakat beranggapan bahwa pemilu ini adalah suatu kewajiban dilihat dari bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang demokrasi. Demokrasi ini dibuktikan dengan adanya pemilihan umum dan masyarakat wajib dalam pelaksanaannya”, Kata Bapak Teguh (salah satu masyarakat Desa Guwosari). Selain faktor kesadaran masyarakat, faktor yang mendasari adalah “keinginan masyarakat untuk mensukseskan pemilu”, kata Bapak Slamet (salah satu Masyarakat Desa Sendangsari). Selain itu, “masyarakat beranggapan sebagai masyarakat harus berpartisipasi dalam pemilu”, Kata Bapak Kawid (salah satu masyarakat Desa Triwidadi). Namun dari pelaksanaan pemilu ini, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pemilu di Kecamatan Pajangan ini masih didominasi oleh kontrol sosial masyarakat yang tinggi.

Pelaksanaan pemilu yang berlangsung di Kecamatan Pajangan dan ketiga desa yang ada di Kecamatan Pajangan ini bisa dikategorikan aman dan kondusif. Hal ini terlihat tidak adanya hal – hal atau tindakan – tindakan yang mengganggu atau membuat keributan dalam

pelaksanaan dalam pemilihan umum tersebut. Akan tetapi, “situasi yang dirasakan kondusif hanya terkesan terlihat oleh kasat mata, karena pada saat pemilu tersebar banyak-banyak isu-isu tentang kecurangan ditengah-tengah masyarakat seperti pebelian TPS oleh salah satu calon kandidat”, Kata Bapak Teguh (salah satu masyarakat Desa Guwosari. Selain itu, “dalam dinamika pemilihannya masih ada terjadi kekeliruan dalam perhitungan suara yang diakibatkan human error atau petugas mengalami kelelahan”, Kata Bapak Zandaru (salah satu warga Desa Triwidadi) dan ada juga terjadi tertukarnya surat suara yang seharusnya pada dapil kasihan nanum masuk di Desa Triwidadi dan adanya tiga surat suara yang telah di coblos namun kejadian ini telah di masukan kedalam berita acara”, Kata Bapak Kawid (salah satu warga Desa Triwidadi).

Dalam hal masyarakat melakukan pengambilan keputusan dalam pemilihan umum di Kecamatan pajangan ini, tidak adanya pengaruh dari orang – orang terdekat. “Memilih dalam pemilu itu sendiri kebebasan tersendiri supaya tidak ada yang saling rebutan dan bertengkar”, Kata Bapak Slamet (salah satu warga Desa Sendangsari). Namun. “tidak menutup kemungkinan pengaruh yang dihadapi oleh masyarakat pasti ada, terlebih lagi pengaruh dari partai politik yang berkampanye” Kata Bapak Teguh (salah satu warga Desa Guwosari).

Selanjutnya, pengetahuan masyarakat tentang proses pemilu di Kecamatan Pajangan masih terjadi kesenjangan antara anggota KPPS dan masyarakat awam pada umumnya, yang dimana anggota KPPS bisa menjelaskan secara detail dari proses pemilu sendiri. “Dalam proses pemilihan umum ini di mulai dari KPU pembukaan pendaftaran calon legislatif atau calon bupati. kemudian diseleksi dan melakukan kelayakan publik jika tidak terjadi permasalahan dianggap layak. Kemudian melakukan sosialisasi, calon melakukan kampanye, pencoblosan, perhitungan, dan penetapan pemenang calon” Kata Bu Miftahul Hasana (salah

satu warga desa Guwosari). Sedangkan, masyarakat awam hanya mengetahui proses pemilu sebatas dalam hari pemilihan. “Dalam proses tahapan pemilu dimulai dari mendaftar saat di TPS kemudian menunggu, mencoblos dan mencelupkan tangan ketinta dan keluar” Kata Bapak Sartijan (Desa Sendangsari).

Disisi lain, dampak dari pemilu itu sendiri telah dirasakan oleh masyarakat yang dimana rata-rata dari mereka berangapan bahwa yang paling mempengaruhi adalah pemilu yang berbasis lokal. “Dampak positif dari pemilu yang dirasakan hanya sebatas Legislatif Bantul atau DPRD Bantul yang dimana terdapat beberapa perubahan yang dilakukan seperti pembangunan jalan, memfasilitasi masyarakat sebagai daerah yang berbasis PDIP” Kata Bapak Kawid(Desa Triwidadi). Masyarakat juga berpendapat bahwa pemilu memberikan edukasi bagi diri mereka sendiri. “pemilu dapat memberikan edukasi tentang demokrasi, sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang demokrasi. Dengan terpilihnya anggota legislatif dan pemimpin beliau merasakan adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan sangat berkembang seperti 4 tahun lalu kabupaten Bantul jalanannya berbatu tetapi sekarang sudah beraspal. Adanya perkembangan PNPM-Mandiri yang memfasilitasi masyarakat misalnya dalam pendidikan yang didukung oleh pemerintah” Kata Bapak Teguh (Desa Guwosari”).

Dalam sosialisasi pemilu, KPU dan anggota KPPS merasa telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Yang sering melakukan sosialisasi adalah KPPS/TPS dan KPU akan tetapi hanya sampai wilayah pendukuhan bukan masyarakat secara keseluruhan, disisi lain partai politik juga melakukan sosialisasi tapi hanya sebagian dari partai politik yang terjun langsung ke masyarakat untuk sosialisasi, sosialisasi tidak berjalan kalau nggak ada masyarakat yang mengajak. Menurut beliau sosialisasi yang diadakan belum mencukupi,

Dengan alasan, sosialisasi nggak langsung ke warganya hanya sebatas wilayah RT dan yang mengikuti sosialisasi hanya laki-laki karena sosialisasinya diadakan cenderung malam” kata Bapak Kawid (Desa Triwidadi). Akan tetapi, yang dirasakan masyarakat awam berbanding terbalik yang dikatakan oleh anggota KPPS. “Dalam hal sosialisasi pemilu beliau berpendapat tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU hanya ada salah satu calon legislatif yang melakukan kampanye” Kata Pak Sartijan (Desa Sendangsari). Selaras dengan pendapat Pak Sartijan “Dalam pengalaman saya yang sering melakukan sosialisasi pemilu adalah partai politik beserta kandidatnya, beliau merasa justru KPU tidak pernah melakukan sosialisasi pemilu” Kata Pak Slamet (Desa Sendangsari).

Politik uang atau sejenisnya merupakan hal yang sering terjadi dalam pemilu, hal ini dirasakan juga oleh masyarakat Pajangan dan beberapa masyarakat juga tidak pernah masyarakat fenomena ini. “Untuk pemberian sembako dan uang, saya belum pernah menerima bantuan tersebut oleh salah satu calon, hal ini membuat saya belum tentu milih calon tersebut. beliau mengetahui bahwa kejadian ini masih banyak yang dilakukan oleh beberapa calon dari calon kepala camat sampai kepala daerah maupun calon legislatifnya” Kata Pak Sartijan (Desa Sendangsari). Selain itu, beberapa masyarakat juga berpendapat jika mereka suatu saat menemukan fenomena ini mereka tetap berkukuh untuk memilih sesuai pilihan mereka masing-masing “Dalam menjelang pemilu beliau pernah mendengar masalah bantuan-bantuan atau pemberian sejumlah uang kepada masyarakat oleh para calon-calon peserta pemilu, akan tetapi beliau belum pernah mengalami. Bila suatu nanti ada kejadian tersebut menurut beliau dia akan tetap menerimanya dan tidak menolak. Akan tetapi, dalam pemilu tetap menentukan pilihan masing-masing” Kata Pak Teguh (Desa Guwosari).

### E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Di Kabupaten Bantul

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dirumuskan resume beberapa faktor determinan partisipasi pemilih di Bantul. Adapun detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Faktor Determinan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul**

<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>FAKTOR DETERMINAN</b>
<b>Bangun-tapan</b>	<b>Bangun-tapan (Tingkat Partisipasi Rendah)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mobilitas penduduk tinggi ( banyak warga yang bekerja di luar wilayah)</li> <li>2) Mayoritas penduduk merupakan warga pendatang</li> <li>3) Caleg kurang / tidak dikenal warga</li> <li>4) Rasionalitas memilih masyarakat tinggi (Caleg terlalu banyak janji )</li> <li>5) Pemutakhiran data bermasalah sebagai akibat dari data demografis yang sangat dinamis</li> </ol>
	<b>Jambidan (Tingkat Partisipasi Tinggi)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mayoritas masyarakat menganggap hak memilih dalam pemilu adalah kewajiban yang harus dilakukan</li> <li>2) Situasi lingkungan yang egaliter dan terbuka</li> <li>3) Mobilitas penduduk rendah</li> <li>4) Afiliasi politik orang terdekat ( Caleg mantan lurah )</li> </ol>
<b>Sanden</b>	<b>Gadingsari (Tingkat Partisipasi Rendah)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pragmatisme (manfaat menggunakan hak pilih tidakimbang dengan penghasilan yang seharusnya didapatkan jika bekerja)</li> <li>2) Mobilitas masyarakat tinggi karena profesinya sebagai nelayan.</li> <li>3) Intensitas sosialisasi kurang karena warga tidak mudah dikumpulkan)</li> </ol>
	<b>Gadingharjo (Tingkat Partisipasi Tinggi)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Intensitas dan inovasi sosialisasi yang tinggi.</li> <li>2) Mobilitas penduduk rendah</li> <li>3) Afiliasi politik orang terdekat</li> </ol>
<b>Imogiri</b>	<b>Imogiri (Tingkat Partisipasi Rendah)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mobilisasi oleh PPS yang juga pengurus lembaga kemasyarakatan.</li> <li>2) Luas wilayah relatif kecil</li> </ol>

	<b>Tinggi)</b>	3) Ada afiliasi politik dengan orang terdekat
	<b>Sriharjo (Tingkat Partisipasi Rendah)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat kejenuhan masyarakat atas pelaksanaan Pemilu yang sering namun manfaat langsung yang diperoleh dari pemilu legislatif tidak signifikan. (Perantau lebih memilih Pilkada/Pilkades daripada Pileg).</li> <li>2) Pemutakhiran data bermasalah karena PPS kurang memahami kondisi administrasi kependudukan setempat (PPS tidak melibatkan pengurus RT yang mengetahui dengan baik lokasi tersebut)</li> <li>3) Sosialisasi yang dilakukan kurang dan tak menarik.</li> <li>4) Masyarakat relatif rasional sehingga memilih atau menghitung perlunya atau tidak perlunya datang ke TPS</li> </ol>
<b>Pajangan</b>	<b>Tridiwidadi (Tingkat Partisipasi Tinggi)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masyarakat menganggap pemilu sebagai kewajiban (Kontrol sosial )</li> <li>2) Ikatan sosial di masyarakat yang tinggi</li> <li>3) Stimulan partisipasi intensif (kolektif)</li> <li>4) Manfaat yang diperoleh jelas (terutama dari pemilu kada dan Pilkades )</li> </ol>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Faktor-faktor yang menentukan tingginya partisipasi masyarakat di Kabupaten Bantul adalah: (a) Afiliasi politik dengan orang terdekat ; (b) stimulus partisipasi; (c) kontrol sosial yang ketat, sehingga prilaku tidak menggunakan hak pilih akan dianggap “ora umum”(d) pragmatisme politik masyarakat yang terkoordinasi oleh lembaga RT/Dukuh terjadi untuk mobilisasi pemilih; (e) Kepedulian kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu
  
2. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak memilih dalam Pemilu adalah: (a) Kejenuhan dan kurangnya manfaat langsung pelaksanaan Pemilu; (b) Keterbatasan sosialisasi serta kurangnya inovasi sosialisasi yang menarik bagi masyarakat; (c) Kinerja pemutakhiran data oleh penyelenggara Pemilu belum optimal, terutama di wilayah yang luas dan mobilitas penduduknya tinggi (d) Cakupan luasnya wilayah serta tingginya mobilitas penduduk menyebabkan pemutakhiran data menjadi isu krusial; (e) ikatan dan kontrol sosial lemah. (f) pragmatisme masyarakat yang memandang ikut pemilu tidak mendapatkan manfaat langsung (lebih berat ke pekerjaan).

## **B. SARAN**

1. Perlu ditempuh upaya penyadaran yang tepat kepada warga masyarakat, agar sebagai pemilih dapat memandang pemilu sebagai hak dan bukan sebagai kewajiban sehingga pelaksanaan Pemilu diharapkan akan lebih berkualitas.
2. Perlu modifikasi sosialisasi yang inovatif, kreatif dan masif sebelum penyelenggaraan Pemilu
3. Pemutakhiran data hendaknya melibatkan kelembagaan, warga secara lebih intensif, menarik dan masif.
4. Perlu upaya inovasi peningkatan partisipasi pemilih berdasar *lesson learnt* yang ada, misalnya: Desa Selo Pamioro yang menjalankan sistem Angkut Pemilih, bisa diaplikasikan di seluruh Bantul.
5. Khusus Desa Banguntapan, perlu ada *treatment* khusus dari KPU guna *membackup* kapasitas dan kuantitas penyelenggara Pemilu yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: PT.Gramedia.
- Dahl, Robert A. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press.
- Damsar, 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Hendrik, Doni. 2010. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi
- Huntington, Samuel P & Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nielsen, Hans-Jorgen, 1991. *The Chilean Process of Transition*, Aarhus: University of Aarhus, Institute of Political Science
- Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008, Jurnal Demokrasi No. 138 Vol. IX No. 2
- Rush, Michael & Phillip Althof, 2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Schumpeter, Joseph. 1947. *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York : Harper.
- Simangunsong, Bonar. 2004. *Negara. Demokrasi dan Berpolitik Yang Profesional*. Jakarta : Gramedia
- Soebagio, 2008. Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia, Jurnal Makara, Vol. 12 No. 2, Desember
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia